



**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN DANA  
PNPM KP PUGAR ( PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMBERDAYAAN  
USAHA GARAM RAKYAT) DI DESA ASEMPAPAN  
KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI  
TAHUN 2011 - 2012**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**PERPUSTAKAAN  
UNNES**

**Oleh :**

**Hariyanto**

**NIM. 7450406022**

**URUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj. Sucihatiningsih DWP,M.Si  
NIP. 196812091997022001

Kusumantoro, S.Pd. M.Si  
NIP. 197805052005011001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, M.Si  
NIP. 196812091997022001



## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, Maret 2013

Hariyanto

NIM. 7450406022

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- “Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?” (QS. Al-Alaq: 14)
- “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (QS. Al Baqarah {2} 286)
- Lebih baik terlambat daripada tidak mengerjakan sama sekali....(Penulis)

### PERSEMBAHAN:

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala karunia-Nya skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ibu dan Bapakku, Terima kasih atas semuanya
- ❖ Keluargaku semuanya
- ❖ Guru dan Dosenku
- ❖ Teman-teman EP'06,
- ❖ Sahabatku

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Program Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR (Pemberdayaan Usaha garam Rakyat) di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2011-2012".

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (satu) guna meraih gelar Sarjana Ekonomi. Penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dengan segala kebijakannya .
2. Dr. S. Martono, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang dengan kebijaksanaanya memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi yang baik
3. Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Dosen pembimbing 1 yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyusun skripsi.dan memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.

4. Kusumantoro S.Pd., M.Si Dosen Pembimbing II yang sangat baik hati dan bersedia membimbing dan memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat pada skripsi penulis selama ini.
5. Fafurida S.E M.Si selaku penguji pada sidang ujian skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan pengarahan yang diberikan.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dan Bapak Ari selaku kepala sie Pengembangan Wilayah pesisir beserta staf dan karyawan yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat.kawan seperjuangan EP'06 kakak dan adik kelas, terima kasih atas bantuan kalian selama ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, jika ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini dapat diterima dengan senang hati. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang telah membantu.

Semarang, 2013

Hariyanto  
NIM.7450406022

## SARI

Hariyanto7450406022. *“Implementasi Program Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2011-2012”*, Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, M.Si Pembimbing II Kusumantoro. S.Pd, M.Si

**Kata Kunci:** Mekanisme, Dana Bantuan Pugar, Pertanian Garam

Sektor pertanian garam di Kabupaten Pati mempunyai peran yang penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat di daerah pesisir. Dan merupakan salah satu sektor unggulan bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Pati karena Kabupaten Pati merupakan salah satu sentra industri garam di Jawa Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR di Desa Asempapan. Manfaat Dana Bantuan Pugar terhadap peningkatan produktifitas petambak garam dan pendapatan petambak garam serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Data primer dari wawancara langsung dengan petambak garam, tim pendamping dan tim teknis/pengawas. Data sekunder yang diperoleh dari instansi yang terkait seperti: Dinas Kelautan dan Perikanan, kantor Kelurahan, BPS, serta berbagai sumber yang relevan dengan penelitian tentang pertanian garam. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini meliputi Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi data dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Mekanisme Program Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR di Desa Asempapan telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun ada sedikit kurang koordinasi dalam sosialisasi program ini. Dana Bantuan PNPM KP PUGAR bermanfaat membantu masalah keuangan ( permodalan ) dan meningkatkan produktifitas petambak garam. Dalam pelaksanaan Program penyaluran Dana Bantuan terdapat dua kendala yaitu kendala teknis dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan dan kendala dalam pengembangan usaha garam rakyat.

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Praktis.....	8

1.3.2 Manfaat Akademis .....	9
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1 Teori Ekonomi pembangunan .....	8
2.2 Teori Basis Ekonomi .....	11
2.3 Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah.....	12
2.4 Teori Ekonomi Pertanian .....	14
1. Pengertian Ekonomi Pertanian .....	16
2.6 Garam dan Industri Garam di Indonesia .....	17
2.7 Implementasi .....	18
2.2.1 Implementasi Kebijakan.....	20
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan George Edward III.....	21
2.3 PUGAR .....	28
2.4 Penelitian Terdahulu .....	30
2.5 Kerangka Berpikir .....	32
2.6 Hipotesis Penelitian.....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.4.1 Lokasi penelitian .....	23
3.4.2 Fokus Penelitian .....	23
3.3 Sumber Data.....	24
3.3.1 Data Primer .....	24
3.3.2 Data Sekunder .....	27

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4.1 Wawancara.....	28
3.4.2 Observasi.....	38
3.4.3 Studi Pustaka.....	38
3.4.3 Dokumentasi.....	38
3.5. Pengecekan Keabsahan Data.....	39
3.5.1 Kepercayaan.....	39
3.5.2 Kebergantungan.....	39
3.5.3 Kepastian.....	40
3.6 Tahap Penelitian.....	40
3.7 Analisis Data.....	41
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
4.1.1 Tinjauan Geografis dan Administratif .....	45
4.1.2 Produksi Garam di Desa Asempapan .....	48
4.1.2 Pengelompokan Industri Garam.....	48
a. Garam Meja.....	48
b. Garam Industri peminyakan.....	49
c. Garam Industri Lainnya.....	49
4.2. Deskripsi Kondisi Responden.....	55
a. Pengalaman Responden menadi Petambak Garam .....	55

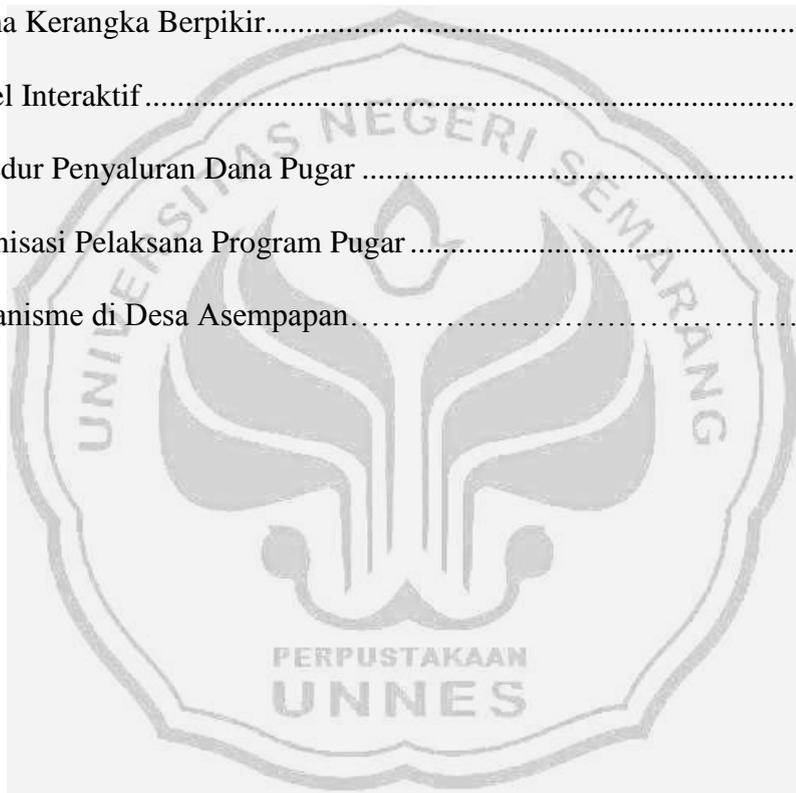
b. Umur Responden.....	56
c. tingkat pendidikan .....	57
4.3. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan .....	58
a. Pengusulan Calon lokasi dan Penerima BLM.....	59
b. Pengusulan dari Aspirasi Masyarakat .....	60
c. Tata Cara dan Prosedur Penyaluran BLM.....	61
d. Organisasi Pelaksana Pugar .....	64
4.4. Manfaat Progam Dana Bantuan Pugar .....	71
4.5 Kendala dalam Penyaluran Dana Bantuan Pugar.....	73
4.2 Pembahasan.....	75
BAB 5 PENUTUP .....	79
5.1 Simpulan .....	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
1.1 Kapasitas Produksi Garam di Kabupaten Pati.....	5
1.2 Luas lahan dan Kapasitas Produksi Garam di Kecamatan Trangkil.....	6
4.1 Luas wilayah Kecamatan Pesisir di Kabupaten Pati.....	45
4.2 Komposisi Penduduk berdasarkan kelompok Usia .....	46
4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Asempapan.....	47
4.4 Pengalaman Responden menjadi petambak Garam.....	56
4.5 Jumlah Responden Menurut Umur.....	57
4.6 Tingkat Pendidikan Responden .....	58
4.7 Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani Garam .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
1. Implementasi George Edward III .....	22
2. Metafora kegagalan Implementasi.....	28
3. Skema Kerangka Berpikir.....	32
4. Model Interaktif .....	43
5. Prosedur Penyaluran Dana Pugar .....	64
6. Organisasi Pelaksana Program Pugar .....	68
7. Mekanisme di Desa Asempapan.....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal.
1. Pedoman Wawancara.....	83
2. Reduksi Data.....	86
3. Surat Ijin Observasi dari Jurusan .....	90
4. Surat Rekomendasi Riset dari litbang.....	91
5. Surat Ijin Penelitian .....	92



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Garam merupakan salah satu kebutuhan yang merupakan pelengkap dari kebutuhan pangan dan merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Walaupun Indonesia termasuk Negara maritime, namun usaha meningkatkan produksi garam belum diminati, termasuk dalam usaha meningkatkan kualitasnya. Di lain pihak untuk kebutuhan garam dengan kualitas baik (kandungan kalsium dan magnesium kurang) banyak diimpor dari luar negeri, terutama dalam hal ini garam beryodium serta garam industri. Kebutuhan garam nasional dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri di Indonesia. Kebutuhan garam nasional selama ini dipenuhi melalui produksi dalam negeri dan sebagian dari impor.

Pada tahun 2009, kebutuhan garam nasional mencapai 2.865.600 ton, dengan total produksi 1.265.600 ton dan dari impor 1.600.000 ton. Pada tahun 2010, dengan terjadinya anomali cuaca, produksi rata-rata hanya mencapai 30.600 ton, sangat jauh dari kebutuhan nasional yang mencapai 2.765.000 ton. Dengan kenaikan rata-rata kebutuhan garam 2.5%, maka diperkirakan kebutuhan garam nasional sebesar 2.975.000 ton, dengan nilai produksi yang diharapkan sebesar 1.343.000 ton. Berdasarkan data nasional tahun 2010 produksi garam secara nasional mencapai 1.401.600 ton, masih jauh lebih rendah dari kebutuhan garam nasional yang mencapai sebesar 2.765.000 ton. Rendahnya produktivitas garam

nasional yang tidak sebanding antara tingkat kebutuhan dan konsumsi garam mengakibatkan Indonesia masih mengimpor garam sejumlah 1.363.400 ton atau sebesar 49.03% dari kebutuhan garam nasional.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan garam secara nasional, maka Menteri Kelautan Dan Perikanan pada tanggal 26 Desember 2009 telah mencanangkan Gerakan Swasembada Garam Nasional. Strategi pencapaian swasembada garam nasional dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan produksi dan peningkatan kualitas garam rakyat serta pemberdayaan masyarakat petambak garam. Dalam mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai tahun 2011 melaksanakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dalam rangka PNPM Mandiri\_KP. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dikoordinir oleh Direktorat Jendral kelautan, pesisir, dan pulau – pulau kecil (Ditjen KP3K) c.q. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha. Berdasarkan rencana strategis Ditjen KP3K, target produksi garam nasional dalam mendukung swasembada garam konsumsi pada tahun 2012 adalah sebesar 300 ribu ton. Dalam mewujudkan target dimaksud, pada tahun 2011 Ditjen KP3K melalui PUGAR menargetkan target produksi garam sebesar 220 ribu ton melalui intensifikasi lahan seluas 3.800 hektar

Pemberdayaan usaha garam rakyat merupakan program pemberdayaan yang di fokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi petambak garam melalui prinsip bottom-up, artinya masyarakat sendiri yang merencanakan kegiatan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha

Garam Rakyat dilakukan kepada para petambak garam yang selama ini kurang mendapat perhatian melalui kegiatan – kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam kegiatan penggaraman, terdapat 4 (empat) isu strategis yang menjadi dasar perhatian dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat yaitu : (1) Isu kelembagaan yang mengakibatkan lemahnya posisi tawar para petambak garam rakyat; (2) Isu permodalan yang menyebabkan para petambak garam rakyat masih belum optimal dalam mengakses sumber permodalan baik dari Bank maupun non Bank sehingga para petambak garam rakyat terjatuh pada bakul, tengkulak dan juragan; (3) Isu regulasi yang menyebabkan lemahnya keberpihakan dan proteksi pemerintah pada sektor garam rakyat, sehingga usaha garam rakyat menjadi tidak propektif dan marketable; dan (4) Isu tata niaga garam rakyat yang sangat liberalistik dengan tidak adanya penerapan standar kualitas dan harga dasar garam rakyat, sehingga terjadi deviasi harga yang sangat tinggi ditingkat produsen petambak garam dan pelaku pasar, serta terjadi penguasaan kartel perdagangan ditingkat lokal. Upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi isu strategis tersebut, diantaranya melalui ; (1) Pemetaan wilayah tambak; (2) Peningkatan kapasitas petambak garam; (3) Fasilitasi kemitraan dalam usaha garam rakyat; (4) Penyaluran bantuan langsung masyarakat.

Selama tahun 2011, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk melaksanakan Pugar. Program ini memiliki empat komponen, yakni penyusunan perencanaan secara partisipatif di tingkat desa, penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), peningkatan kapasitas petambak garam rakyat, dan

mewujudkan Kemitraan Usaha Garam Rakyat. Saat ini, KKP telah menetapkan sembilan Kabupaten-Kota sebagai sentra Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) untuk merealisasikan target tersebut, yaitu Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban dan Nagekeo

Di Indonesia walaupun merupakan negara kepulauan, tetapi pusat pembuatan garam terkonsentrasi di Jawa dan Madura yaitu di Jawa seluas 14.231 Ha (Jawa Barat 1.159 Ha, Jawa Tengah 5.168 Ha, Jawa Timur 6.904 Ha) dan Madura 15.347 Ha (Sumenep 10.067 Ha, Pamekasan 3.075 Ha, Sampang 2.205 Ha). Luas areal yang dikelola oleh PT Garam hanya 5.116 Ha yang seluruhnya berada di pulau Madura yaitu di Sumenep 3.163 Ha, Pamekasan 907 Ha dan di Sampang 1.046 Ha. Lokasi lainnya yaitu di NTB seluas 1.155 Ha, Sulawesi Selatan 2.040 Ha, Sumatera dan lain-lain 1.885 Ha, sehingga luas areal penggaraman seluruhnya sebesar 30.658 Ha dimana 25.542 Ha dikelola secara tradisional oleh rakyat. Areal garam yang dikelola oleh PT. Garam produksinya 60 ton/Ha/tahun, sedang garam rakyat hanya 40 ton/Ha/tahun (PT. Garam Persero, 2000).

Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sejak dulu dikenal daerah produsen garam “krosok” (garam tradisional) terbesar di Jawa Tengah bahkan secara nasional. Namun ironis, kini justru menjadi pengimpor garam. Itu karena keadaan alam yang tak menentu/ekstrim. Membuat produksi garam dari kabupaten itu merosot drastis. Jika berlangsung musim kemarau panjang, produksi garam rakyat di daerah-daerah Jateng tersebut meningkat. Sebaliknya bila musim penghujan

berlangsung berkepanjangan, seperti tahun lalu dan mungkin tahun 2011 ini, otomatis produksi akan merosot tajam. Produksi garam rakyat tahun 2009, sebesar 171.654,83ton. Tetapi pada tahun 2010 hanya 149.763,85ton saja, akibat musim penghujan berlangsung panjang

Lahan tambak garam Jateng saat ini sekitar 5000Ha/6000 Ha. Di Kab.Pati tercatat lahan tambak garam sekitar 2500 Ha, sentra-sentra produksi garam rakyat terdapat di Kecamatan Trangkil, Wedarijaksa, Juwana dan Batangan Kini banyak lahan garam beralih fungsi jadi perumahan, seiring kian bertambahnya penduduk. Dulu garam Pati menguasai pangsa skala nasional. Sekarang hanya mampu mensupply 50% kebutuhan garam di Jateng

**. Tabel 1 Kapasitas Produksi Garam Di Kabupaten Pati**

<b>Tahun</b>	<b>Kapasitas produksi (ton/thn)</b>
2012	269.802,20
2011	179.731,09
2010	149.763,85
2009	171.654,83
2008	164.420,42

*Sumber: BPS Jawa Tengah*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati di Kecamatan Trangkil ada empat Desa yang menjadi sentra produksi garam dengan luas lahan keseluruhan 288.68 hektar dengan kapasitas produksi mencapai  $\pm$  21000 ton/tahun.

**Tabel 1.2 Luas Lahan Garam Di Kecamatan Trangkil**

NO	DESA	LUAS LAHAN (Ha)	Kapasitas produksi (ton/tahun)	Harga (Rp)
1.	Asempapan	66.15	5292.01	Rp 750/kg
2.	Sambilawang	80.43	6442.45	Rp 750/kg
3.	Guyangan	51.39	3417.35	Rp 750/kg
4.	Kertomulyo	68.92	5314.54	Rp 750/kg
5.	Kadilangu	13.29	538.25	Rp 750/kg
6.	Tlutup	8.50	344.28	Rp 750/kg

Sumber : *Monografi Kecamatan trangkil ( 2012)*

Ironisnya sekarang daerah penghasil garam terbesar di Jateng (Pati dan Rembang), justru mengimpor garam dari India, Yordania dan Australia, guna mencukupi kebutuhan garam didaerah mereka; Mengingat dua daerah itu terdapat/berkembang berbagai industri rakyat, unsumnya berbahan baku garam. (Home) Industri terbesar diserap sektor perikanan (pengasinan/pengawetan ikan).

Setiap bulan garam yang diimpor untuk mencukupi kebutuhan daerah Pati dan Rembang, sekitar 30 ton dengan harga antara Rp 900/Kg sampai Rp 1.050/Kg. Harga impor itu memang relatif lebih rendah dari pada harga garam lokal, Rp 1.200/Kg. Sebab dari segi kualitas, garam krosok lokal lebih bagus dari pada garam impor. produksi garam di tingkat provinsi saat ini 540.000 ton/tahun. Sedangkan kebutuhan yang diperlukan sebesar, 975.000 ton/tahun. Sehingga terdapat defisit, 435.000 ton/tahun. Angka defisit dari tahun ke tahun cenderung naik, karena berbagai faktor seperti penyusutan lahan dan kendala cuaca ekstrim

dan permodalan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana Pemerintah membuat sebuah kebijakan yang tujuannya untuk memberdayakan usaha garam rakyat sehingga target tentang swasembada garam dapat terpenuhi. Dan bagaimana Pemerintah mengimplementasikan kebijakan ini supaya target yang dituju dapat berhasil. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada sektor pertanian garam di Kecamatan Trangkil khususnya di Desa Asempapan. Oleh karena itu penulis mengambil judul skripsi "**Implementasi Program Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) Di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2011-2012**

## **I.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana bantuan PNPM KPPUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil tahun 2011-2012?
2. Apa manfaat program dana bantuan PNPM KP PUGAR bagi para petani garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil.?

3. Kendala apakah yang dihadapi dan solusi apa yang dapat diambil dalam mengatasi kendala tersebut dalam program pemberdayaan usaha garam rakyat?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yang ingin di capai adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana bantuan PNPM KP PUGAR di desa Asempapan Kecamatan Trangkil tahun 2011 dan 2012 dan hasil yang dapat dicapai
2. Untuk mengetahui manfaat yang di peroleh petambak garam dari Program Penyaluran dana bantuan PUGAR
3. Untuk mengetahui kendala apakah yang dihadapi dan solusi apa yang dapat diambil dalam mengatasi kendala tersebut dalam Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Dengan di adakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti.

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang masalah-masalah pembangunan ekonomi yang ada baik dipemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulis lainnya yang berkaitan dengan Program PNPM KP PUGAR.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam merencanakan pembangunan ekonomi



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Teori Ekonomi Pembangunan

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan kegiatan yang dilakukan suatu wilayah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan suatu proses yang dapat menyebabkan pendapatan perkapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno,1985:13) dalam Bahtiar, (2010:06).Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi secara terus menerus didalamnya telah mengandung unsur unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.adanya proses pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita untuk jangka panjang.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai aspek dan kebijakan yang komprehensif, baik ekonomi maupun non ekonomi.sasaran pembangunan ekonomi menurut todaro dalam suryana minimal ada 3 yaitu ,: 1 menyediakan persediaan dan pemerataan bahan pokok, 2 meningkatkan taraf hidup dan 3 memperluas jaringan ekonomi dan sosial. Sedangkan modal pembangunan ekonomi menurut suryana (2000:63), yaitu pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi begitu pula sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Tetapi pengertian pertumbuhan ekonomi berbeda dari pengertian pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai gross domestic product (GDP), tanpa memandang kenaikan pendapatan lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau tanpa memandang ada perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak. Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, dimana kenaikannya dibarengi dengan perombakan dan modernisasi serta memperhatikan aspek pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi lebih melihat target, tetapi pembangunan lebih melihat prosesnya. Pada umumnya, pembangunan selalu diikuti dengan pertumbuhan, tetapi dalam pertumbuhan belum tentu disertai pembangunan

### **2.1.2 Teori Basis Ekonomi**

Teori basis ekonomi bertujuan untuk mengidentifikasi sektor sektor mana yang merupakan sektor yang dapat meningkatkan kemajuan atau pertumbuhan dari suatu region atau wilayah. Dalam teori basis ekonomi, perekonomian regional dibagi dua sektor, yaitu sektor basis dan sektor non basis.

Sektor basis adalah sektor sektor yang mengekspor barang barang dan jasa ketempat diluar batas perekonomian masyarakat yang

bersangkutan atau yang memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang berada dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sektor-sektor yang tidak mengekspor barang, ruang lingkup produksi mereka, dan daerah pasar mereka terutama adalah bersifat lokal (Glasson, 1977:63) dalam Bahtiar (2010:12) Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat *endogenous* (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan (Tarigan, 2004:53) dalam Devita (2007:15).

Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis (Richardson, 1977: 14) dalam Devita (2007:15) Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan kedalam wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir ke dalam suatu wilayah, sehingga

akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas non basis. Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999:300). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

Dari pengertian teori basis ekonomi dapat menunjukkan bahwa pertanian garam merupakan salah satu sektor ekonomi unggulan bagi masyarakat Desa Asempapan. Industri ini menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat Desa Asempapan di musim kemarau. Sebagian besar hasil produksi garam di desa ini di distribusikan keluar wilayah desa bahkan banyak yang mendistribusikan sampai ke luar provinsi . industri garam juga menjadi tumpuan tidak hanya bagi petani garam itu sendiri, tetapi juga masyarakat lain seperti para kuli angkut, tengkulak, pengusaha dan buruh pabrik pengolahan garam (garam briket). Dapat dikatakan bahwa industri ini bisa meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Desa Asempapan.

### **2.1.3. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi ( arsyad, 1999:298) lebih lanjut, arsyad menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan intuisi-intuisi baru.pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa lebih baik, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan disuatu daerah. Adisasmita (2005:4) dalam Bahtiar (2010:15) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi wilayah merupakan usaha mempercepat pembangunan wilayah dengan suatu kebijakan secara menyeluruh. Pembangunan daerah mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan prinsip skala prioritas, sehingga hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama, yaitu meningkatkan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat harus menggunakan sumber-sumber yang daya yang di perlukan untuk merancang pembangunan perekonomian daerah (arsyad,1999:298).

Dengan dilaksanakannya kebijakan dari pemerintah mengenai penyaluran dana PNPM KP PUGAR kepada masyarakat petani garam di wilayah yang telah di tentukan, dimana PUGAR itu sendiri merupakan program pemberdayaan yang di fokuskan pada peningkatan kesempatan

kerja dan kesejahteraan bagi petambak garam melalui prinsip bottom-up, artinya masyarakat sendiri yang merencanakan kegiatan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. telah terjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah tersebut.

#### **2.1.4. Teori Ekonomi Pertanian**

##### **1. Pengertian Ekonomi Pertanian**

Ilmu ekonomi pertanian adalah termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu kemasyarakatan (*social science*), ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya serta hubungan antar manusia. Perilaku yang dipelajari bukanlah hanya mengenai perilaku manusia secara sempit, misalnya perilaku petani dalam kehidupan pertaniannya, tetapi mencakup persoalan ekonomi lainnya yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran, dan konsumsi petani atau kelompok-kelompok petani.

Dengan pengertian ekonomi pertanian yang demikian maka analisis usahatani beserta pengolahan hasil-hasil pertanian, kebijakan pertanian, hukum-hukum dan hak-hak pertanahan termasuk bidang-bidang yang harus dipelajari oleh ekonomi pertanian. Dengan demikian ilmu ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai bagian dalam ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik mikro maupun makro.

Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian daerahnya berada di daerah tropis yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Disamping pengaruh khatulistiwa, ada dua faktor alam lain yang ikut memberi corak pertanian Indonesia yaitu banyaknya pulau-pulau dan topografinya yang bergunung-gunung. Indonesia juga merupakan negara agraris, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian Nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk Nasional yang berasal dari pertanian.

Pentingnya sektor pertanian dapat pula dilihat dari besarnya nilai ekspor yang berasal dari pertanian. Pertanian dalam arti luas mencakup: (1) Pertanian rakyat atau pertanian dalam arti sempit (2) Perkebunan (termasuk didalamnya perkebunan rakyat dan perkebunan besar) (3) Kehutanan (4) Peternakan dan (5) Perikanan (dalam perikanan dikenal lebih lanjut yaitu perikanan darat dan perikanan laut). Sedangkan menurut Moehar Daniel (1996) mengatakan bahwa: *“Ekonomi Pertanian merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dengan ilmu pertanian yang memberi arti sebagai berikut: Suatu ilmu yang mempelajari dan membahas serta menganalisis pertanian secara ekonomi, atau ilmu ekonomi yang diterapkan pada pertanian”*.

Dari pengertian diatas bahwa ekonomi pertanian merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dengan ilmu pertanian. Ilmu ini menjadi satu ilmu tersendiri yang mempunyai manfaat yang besar dan berarti dalam

proses pembangunan dan pemacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Didalamnya tercakup analisis ekonomi dan proses (teknis) produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi pertanian, hubungan antar faktor produksi, dan produksi itu sendiri. Analisis juga diterapkan sesudah proses produksi, antara lain mengkaji hubungan antara produksi dengan kebutuhan yang sangat erat kaitannya dengan harga dan pendapatan

#### **2.1.5. Garam dan Industri Garam Indonesia**

Berawal dari pertanian di ladang-ladang garam secara tradisional, Industri Garam Indonesia terus berkembang, hingga saat ini menjadi salah satu bidang industri yang memberi penghidupan bagi banyak masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingkat kebutuhan dan rangkaian kegiatan yang menyertai keberadaan garam. Dari material awal, yaitu garam kasar (krosok), industri garam di Indonesia memproduksi berbagai jenis garam untuk memenuhi berbagai keperluan akan garam. Baik untuk kebutuhan rumah tangga, maupun kebutuhan industri, peternakan, dan pertanian. Namun demikian, industri garam di Indonesia bukan berarti berjalan mulus tanpa hambatan dan kendala.

Kualitas garam yang belum maksimal, ketidakstabilan harga garam, proses produksi yang masih bersifat tradisional, dan persaingan dengan komoditi garam dari luar negeri merupakan sedikit dari sekian banyak masalah garam di Indonesia. Hal inilah yang harus terus dibenahi dan disempurnakan hingga Industri Garam Indonesia mampu menjadi Pilihan Utama bagi seluruh lapisan masyarakat. Garam Beryodium Garam yang

didalamnya terkandung senyawa Kalium Iodat (Garam Beryodium) merupakan salah satu nutrisi penting yang harus dikonsumsi secara teratur oleh manusia. Jumlah garam yang harus dikonsumsi per hari untuk setiap orang kurang lebih adalah 9 gram. Untuk masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia, selain untuk memenuhi nutrisi tubuh konsumsi garam ditujukan juga untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan yodium.

Garam beryodium adalah garam konsumsi yang mengandung komponen utama Natrium Chlorida ( $\text{NaCl}$ ) minimal 94,7%, air maksimal 5% dan Kalium Iodat ( $\text{KIO}_3$ ) sebanyak 30-80 ppm (mg/kg) serta senyawa-senyawa lain. Penyebaran garam beryodium pada masyarakat saat ini merupakan upaya pemerintah yang paling efektif dalam rangka penanggulangan masalah GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium). Garam merupakan salah satu bumbu masak yang hampir setiap makanan atau masakan membutuhkannya, sehingga dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat.

Industri garam nasional yang sebenarnya berasal dari garam rakyat tradisional (mutu rendah) yang kemudian diproses lebih lanjut menjadi garam briket (untuk bahan pengawet dan keperluan industri), garam halus (garam meja) dan sangat halus (bahan baku hujan buatan) serta makin bersih dan baik kualitasnya (tinggi  $\text{NaCl}$ -nya dan rendah kadar airnya) tersebut; dihasilkan terutama di sentra-sentra garam yang terletak di : ” Barat : Cirebon ” Tengah : Pati, Rembang, Gresik dan Pulau Madura ” Timur : NTB (Bima), NTT dan Sulawesi Selatan (Jeneponto), yang pada saat ini

hanya menghasilkan produksi rata-rata 1 juta ton / tahun. Produksi garam rakyat ini hanya dapat diharapkan selama musim kering saja, yang berjalan secara efektif selama kurang-lebih 3-4 bulan saja selain 1,5 bulan sebelumnya untuk masa persiapan produksi; untuk keperluan sisa waktu dalam satu tahun, diperlukan adanya stok garam yang cukup banyak. Belakangan ini, penggunaan garam sebagai konsumsi sangat kecil bila dibandingkan dengan penggunaannya sebagai bahan baku untuk pengolahan / industri (terutama untuk pabrik pulp dan industri yang membutuhkan banyak chlor dan soda). Penggunaan garam untuk industri secara nasional mencapai 1,9 – 2 juta ton / tahun, sedangkan untuk konsumsi hanya membutuhkan sekitar 0,8 juta ton / tahun; sehingga kebutuhan nasional akan garam mencapai 2,7 – 2,8 juta ton / tahun. Kekurangan supply garam (terutama untuk industri) tersebut dipenuhi dengan import garam (dari Australia) sebanyak 1,7 – 1,8 juta ton / tahun.

## **2.2 Implementasi**

### **2.2.1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar sangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia termasuk masalah konflik, keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu, tidak salah jika implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijakan (bahtiaar 2010 : 16 ) selain itu, menurut andrew dunsire (1978) dan walter williams (1971;

1975) dalam Devita (2007: 11-15) mengungkapkan suatu gejala dalam implementasi adalah:

Andrew dunsire (1978) dalam Devita (2007:14) mengemukakan suatu gejala dalam implementasi kebijakan yang dinamakan dengan istilah *implemetasion gap* untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang senyatanya (sebagai hasil atau prestasi dan pelaksanaan kebijaksanaan). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh walter williams (1971;1975) dalam Devita (2007:14) disebut sebagai *implementation capacity* dari organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijaksanaan (*police decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijaksanaan dapat dicapai.

Selain berdasarkan pandangan di atas Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam Devita, 2007:65).

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan

bahwa: Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam Bahtiar (2010:27)).

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

### 2.2.2 Model Implementasi Kebijakan (George Edward III)

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi George Edward III.

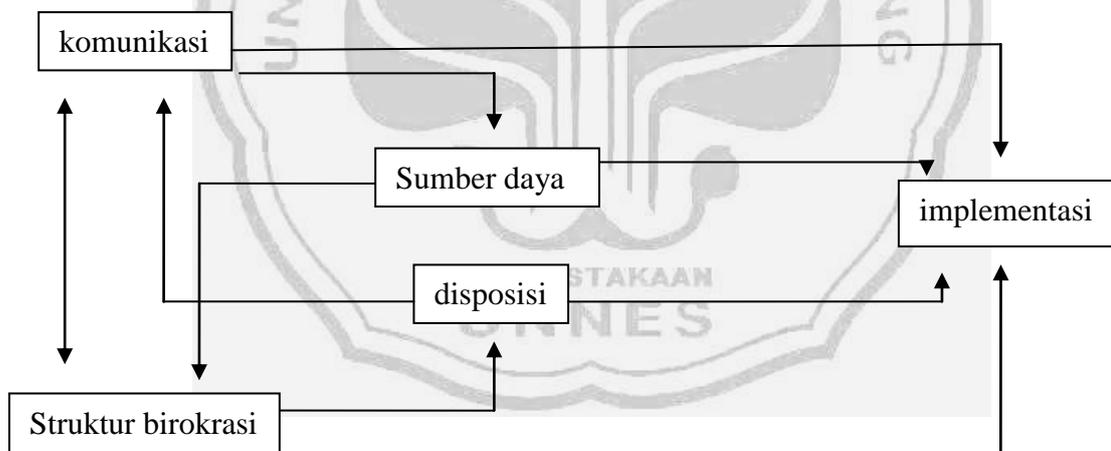
Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam

studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Gambar 1. Implementasi George C. Edward III



Sumber : subarsono, 2005: 91

#### a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan

berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97) dalam Devita (2007:22). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

#### b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Bahtiar (2010:28) mengemukakan bahwa:

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan

untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

### 3) Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

### 4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

### c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program

yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

#### d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Mustopadidjaya (2005 : 37) dari lembaga administrasi negara (LAN) dalam bahtiar (2010: 20-22) mengatakan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan memang tergantung dari beberapa kondisi, (a) ketepatan

kebijakan itu sendiri; (b) konsistensi efektivitas pelaksanaannya; (c) terjadi tidaknya perkembangan diluar perkiraan (*any unanticipated condition*)

(a) semestinya sudah dicapai dalam tahapan formulasi dan itu dapat disimak pada desain kebijakan. Yang perlu dicermati lebih jauh pada tahapan implementasi adalah : (1) validitas asumsi yang mendasari, dilihat dari konteks dinamika perkembangan keadaan “lingkungan kebijakan” yang aktual dan dari “wilayah kerja” dimana kebijakan yang dilaksanakan tersebut dapat bervariasi atau berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya; dan (2) ketepatan momentum pemberlakuannya yang dapat berbeda sebagai akibat dinamika perkembangan dan bervariasinya kondisi lingkungan strategik menurut wilayah

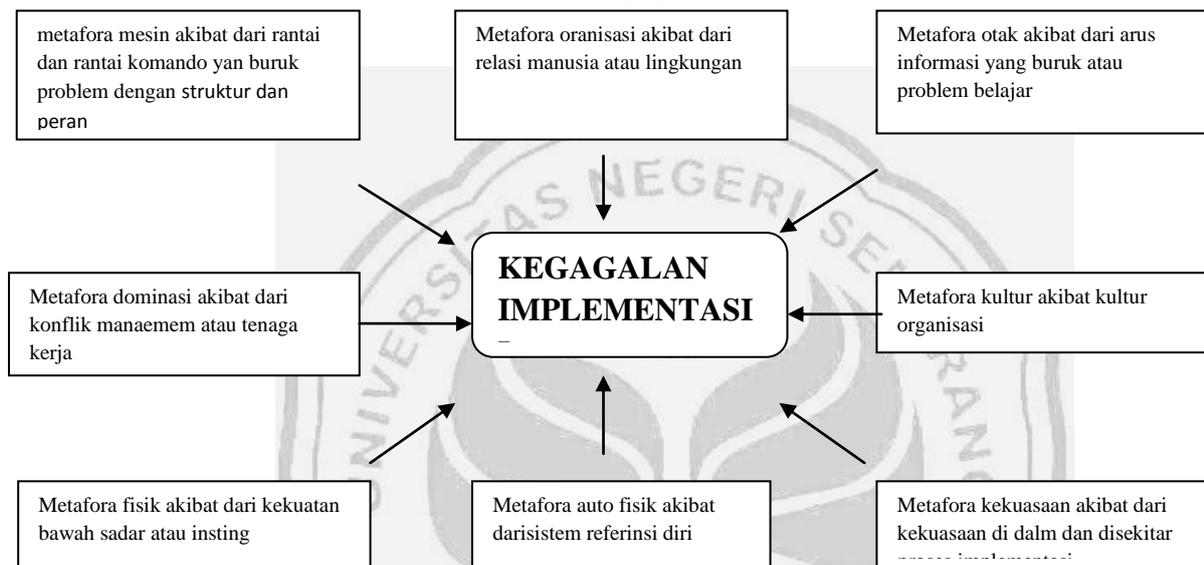
Kondisi (b) tergantung beberapa faktor dimana kemungkinan kegagalan (*policy failure*) dapat disebabkan oleh *non-implementation* atau oleh *unsuccessful-implementation*. Kondisi *non-implementation* terjadi apabila kebijakan tidak dijalankan secara semestinya, disebabkan oleh tidak adanya kerjasama antar pelaksana, terdapat beberapa kendala yang tidak teratasi dan sebagainya. Sedangkan *unsuccessful-implementation* terjadi apabila kebijakan tidak menggapai tujuan yang ditetapkan padahal dilaksanakan secara utuh.

Kondisi (c) merupakan keadaan yang terjadi diluar kemampuan untuk mengontrolnya atau diluar kendali.

Berkaitan dengan kompleksnya kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam implementasi, morgan dalam studinya mencoba memetakan

beberapa metfora kegagalan dalam proses implementasi. Dimulai dari rantai komando yang buruk, konflik manajemen, kultur organisasi, kekuatan bawah sadar, atau groupthink/pertahanan ego/insting, sistem referensi diri ataupun kegagalan yang diakibatkan karena adanya kekuasaan didalam dan disekitar proses implementasi seperti gambar di bawah ini

Gambar 2 Metafora kegagalan implementasi



Sumber : Mustopawidjaya, 2005: 35

Analisis kompleksitas disini dimaksudkan bukanlah mencari sintesis, tapi sebaliknya mengakui perbedaan, partiality, ketidaklengkapan, dan distorsi yang inheren dalam pengetahuan manusia. Metafora/model teori bukan hanya menghasilkan pandangan atau cara pandang, tetapi juga mengabaikan pandangan. Implementasi pada setiap kebijakan bersifat unik, tidak ada satu strategi yang bersifat kaku dan tunggal yang menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.

### 2.3. PUGAR ( Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat )

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut PUGAR adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri KP melalui bantuan pengembangan usahadan pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkembangkan usaha garam rakyat sesuai dengan potensi desa

Dana bantuan langsung adalah stimulasi dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan untuk mengatasi kendala keterbatasan kemampuan dan modal usaha pertanian garam melalui PNPM KP ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan ) PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) merupakan program pemberdayaan yang di fokuskan pada peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi petambak garam melalui prinsip bottom-up, artinya masyarakat sendiri yang merencanakan kegiatan, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dilakukan kepada para petambak garam yang selama ini kurang mendapat perhatian melalui kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam kegiatan penggaraman, terdapat 4 (empat) isu strategis yang menjadi dasar perhatian dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat yaitu : (1) Isu kelembagaan yang mengakibatkan lemahnya posisi tawar para petambak garam rakyat; (2) Isu permodalan yang menyebabkan para petambak garam rakyat masih belum optimal dalam mengakses sumber permodalan baik dari Bank maupun non Bank sehingga para petambak garam rakyat terjerat pada bakul, tengkulak

dan juragan; (3) Isu regulasi yang menyebabkan lemahnya keberpihakan dan proteksi pemerintah pada sektor garam rakyat, sehingga usaha garam rakyat menjadi tidak propektif dan marketable; dan (4) Isu tata niaga garam rakyat yang sangat liberalistik dengan tidak adanya penerapan standar kualitas dan harga dasar garam rakyat, sehingga terjadi deviasi harga yang sangat tinggi ditingkat produsen petambak garam dan pelaku pasar, serta terjadi penguasaan kartel perdagangan ditingkat lokal.

Upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi isu strategis tersebut, diantaranya melalui ; (1) Pemetaan wilayah tambak; (2) Peningkatan kapasitas petambak garam; (3) Fasilitasi kemitraan dalam usaha garam rakyat; (4) Penyaluran bantuan langsung masyarakat. Selama tahun 2011, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk melaksanakan Pugar. Program ini memiliki empat komponen, yakni penyusunan perencanaan secara partisipatif di tingkat desa, penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), peningkatan kapasitas petambak garam rakyat, dan mewujudkan Kemitraan Usaha Garam Rakyat. Saat ini, KKP telah menetapkan sembilan Kabupaten-Kota sebagai sentra Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) untuk merealisasikan target tersebut, yaitu Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban dan Nagekeo.

#### **2.4. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mengenai pertanian garam dan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Disini akan dicantumkan

beberapa hasil penelitian sebagai bahan referensi dalam penulisan penelitian ini.

**Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

Nama peneliti. tahun dan Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Tujuan penelitian
Mohammad Bahtiar affandi/2010/ Implementasi Dana Bantuan Agribisnis Pengembangan Usaha Peternakan Itik Di Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Brebes Tahun2006-2007	Kualitatif dengan Analisis deskriptif kualitatif	mekanisme program penyaluran dana bantuan agribisnis telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku,Dana bantuan Agribisnis membantu masalah permodalan dan meningkatkan produktifitas petani/peternak di dua kecamatan tersebut. Dalam pelaksanaanya juga terdapat dua kendala yaitu kendala teknis dalam penyaluran dana bantuan agribisnis dan kendala dalam pengembangan peternakan.	Untuk mengetahui mekanisme penyaluran. Manfaat dan kendala dalam implementasi dana bantuan agribisnis pengembangan usaha peternakan
Mohammad Arif/2007/ Dampak penerapan “Metode Pilot Project Ladang Garam Terhadap Pendapatan Petani Garam Rakyat ( Studi Kasus Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang	Deskriptif kuantitatif	Proyek percontohan ini memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan produksi garam masyarakat desa tersebut, hasil penelitian juga menunjukkan kualitas garam menjadi lebih baik. Sehingga mampu bersaing dengan garam impor dan garam dari daerah lain.	Mengetahui dampak penerapan teknologi ini terhadap pendapatan petani garam. Bagaiman respon petani garam terhadap metode ini. Dan apa upaya pemerintah dalam mendukung keberhasilan proyek ini.
Mahdi/2009/ Upaya Peningkatan Produksi dan Kualitas Garam Nasional	Kuantitatif	ada 5 upaya yang dapat dilakukan petani garam untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam yaitu Peningkatan kecepatan penguapan air laut, Penurunan peresapan tanah, Pengaturan konsentrasi pengkristalan garam, Perbaikan cara pengolahan tanah, Penggunaan teknologi baru dalam produksi	Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan petani garam untuk meningkatkan produksi garam dan kualitas garam.

Pada penelitian Mohammad Bahtiar Affandi tentang Implementasi Dana Bantuan Agribisnis Pengembangan Usaha Peternakan Itik Di Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Brebes Tahun 2006-2007 persamaan dengan penelitian penulis terletak pada alat analisisnya dan perbedaan pada objek penelitian. Di penelitian Muhammad Arif ada beberapa persamaan yaitu: objek penelitian dan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk meningkatkan produksi garam. Perbedaannya terdapat pada alat analisisnya. Di penelitian ke tiga ada persamaan mengenai bagaimana meningkatkan produksi dan kualitas garam dan perbedaan terdapat pada metode penelitian dan penelitian ini bersifat mikro ekonomi

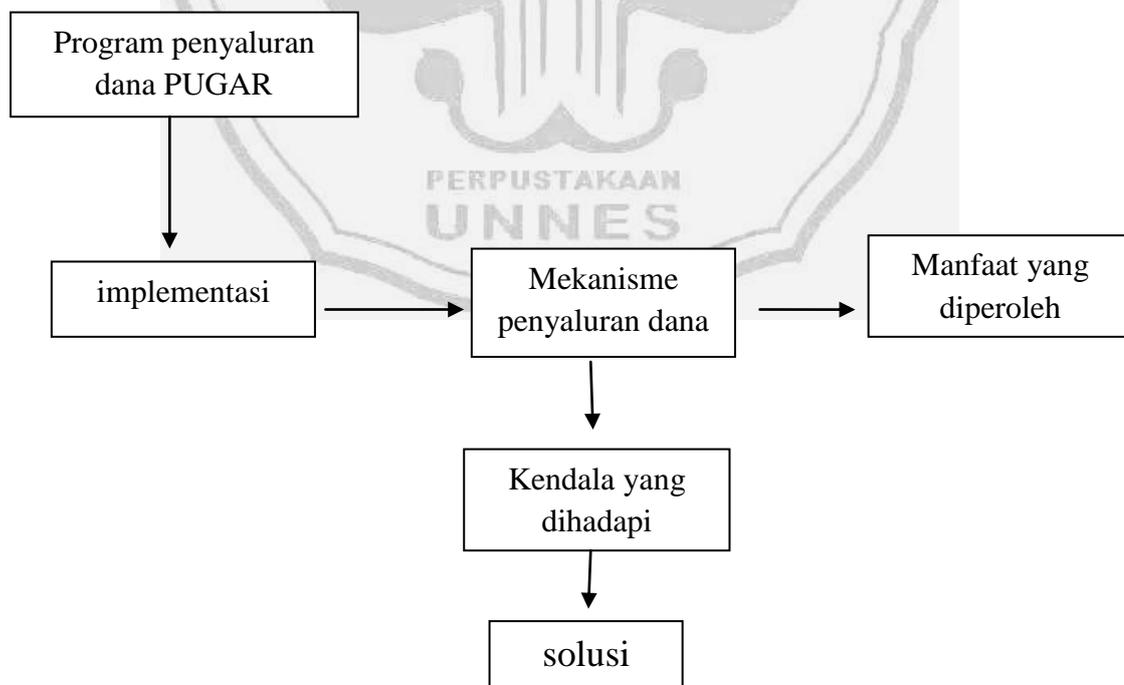
## **2.5 KERANGKA BERPIKIR**

Implementasi merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, ada mekanisme yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan kebijakan tersebut supaya tujuan yang telah diinginkan dapat berhasil.

Dalam pelaksanaan program ini perlu adanya pemantauan dan evaluasi supaya kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat diminimalisir. Dan perlu adanya kerjasama antara Pemerintah dan petani garam untuk duduk bersama memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Program penyaluran Dana PNPMPK PUGAR ini ditujukan dan di alokasikan untuk mengatasi kendala keterbatasan kemampuan dan modal usaha pertanian garam. salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam usaha ini adalah masalah permodalan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi penyaluran dana PNPMPK PUGAR di kecamatan Trangkil, khususnya di desa Asempapan. Usaha pertanian garam yang ada di desa Asempapan sebenarnya adalah usaha yang cukup potensial tetapi karena usaha ini sangat tergantung dengan kondisi cuaca dan iklim ( musim kemarau ) maka oleh masyarakat desa Asempapan masih dianggap sebagai usaha sampingan.

Adapun skema kerangka berpikir dalam penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 3 skema kerangka berpikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam setiap penelitian tidak lepas dari suatu metode tertentu. Penggunaan metode dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian yang tidak kabur atau bias. Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus ditempuh dalam kegiatan penelitian agar pengetahuan yang di capai dari suatu penelitian dapat memenuhi karya ilmiah (hadi, 1984 :3).dalam Bahtiar (2010:32) Dengan demikian metode ini dimaksudkan agar penelitian dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Masalah pemilihan metode penelitian bukan baik buruknya yang dipakai, tetapi tergantung pada ketepatan penggunaan metode tersebut, yakni kesesuaian antara metode yang dipakai dengan objek dari jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dalam Moleong (2007:6) dalam Bahtiar (2010:32) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah

### **3.1.Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di tempat permasalahan yang di teliti itu terjadi, yaitu di desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Desa Asempapan merupakan salah satu sentra produksi garam di Kecamatan Trangkil.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini fokus pada permasalahan implementasi kebijakan mengenai bagaimana mekanisme penyaluran dana bantuan PUGAR kepada petani garam, apa manfaat dari kebijakan ini dan apa saja kendala yang terjadi dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

### **3.3. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Menurut Nasution Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Implementasi penyaluran dana bantuan PNPM KP PUGAR di Desa Asempapan yaitu dengan cara wawancara dengan masyarakat petani garam Desa Asempapan dan pihak-pihak yang terkait dalam program ini.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Data sekunder dalam penelitian data yang diperoleh dari instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian ini yaitu Pemerintahan Desa Asempapan, Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pati dan juga dari sumber-sumber lainnya seperti Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dan Internet.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan triangulasi data, yang dilakukan dengan menggabungkan antara wawancara, studi pustaka, dan observasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung dan mendalam (*in depth interview*) kepada responden dimana peneliti membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan (interview guide) yang akan diajukan dalam proses wawancara terbuka. Pada wawancara terbuka yang “diwawancarai” mengetahui bahwa mereka sedang

diwawancara dan mengetahui pula maksud wawancara itu. Sehingga data atau informasi yang diperoleh lebih mengutamakan persepsi informan atau diistilahkan sebagai informasi dalam “perspektif emic”. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkompeten, yaitu petani garam desa Asempapan, Kepala Desa di Desa Asempapan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, dan pihak-pihak yang terkait terhadap kebijakan ini. Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang bagaimana program ini dilaksanakan dan bagaimana respon yang diberikan oleh petani garam di Desa Asempapan.

## 2. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan dengan tujuan mengerticiri-ciri dan luasnya signifikasi dari interelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks dalam pola-pola kultural tertentu. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap kondisi lingkungan dan fakta sosial yang terjadi terhadap obyek penelitian.

Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal yang dirasa berguna .dalam menunjang pembuatan penelitian ini. Observasi langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal

### 3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, Perda, Laporan-laporan, dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Implementasi Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR di Desa Asempapan.

### 3.5. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Moleong dalam kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu : (1) kepercayaan (kreadibility), (2) keteralihan (tranferability), (3) kebergantungan (dependibility), (4) kepastian (konfermability). Dalam penelitian kualitatif ini memakai 3 macam antara lain :

#### 1. Kepercayaan (kreadibility)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik : teknik triangulasi, sumber, pengecekan

anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan refrensi.

## 2. Kebergantungan (dependability)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dipendability oleh ouditor independent oleh dosen pembimbing.

## 3. Kepastian (konfermability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit

### **3.6. Tahap-Tahap Penelitian**

Moleong mengemukakan bahwa Pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu : (1) tahap sebelum ke lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, (4) tahap penulisan laporan. Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

- a) Tahap sebelum kelapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat peneliti,

mencakup observasi lapangan dan permohonan ijin kepada subyek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian.

b) Tahap pekerjaan lapangan, meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan implementasi program penyaluran dana PNPM KP PUGAR di Desa Asepaman. Data tersebut diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

c), Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi dokumen maupun wawancara mendalam dengan petani garam dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

d) Tahap penulisan laporan, meliputi : kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan skripsi yang kemudian ditindaklanjuti hasil bimbingan tersebut dengan penulis skripsi yang

sempurna. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian skripsi.

### 3.7. Analisis Data

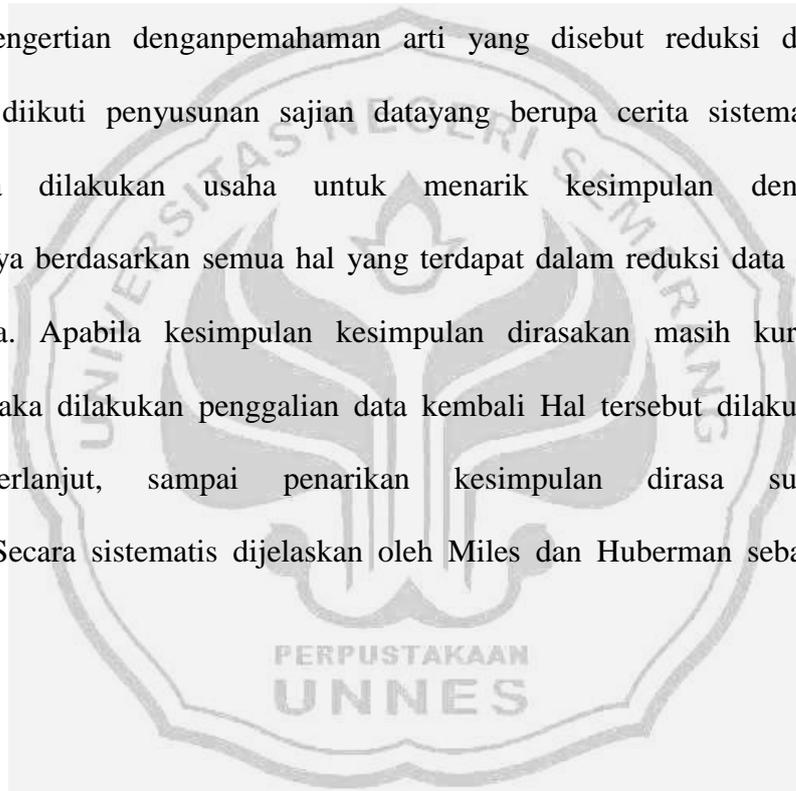
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

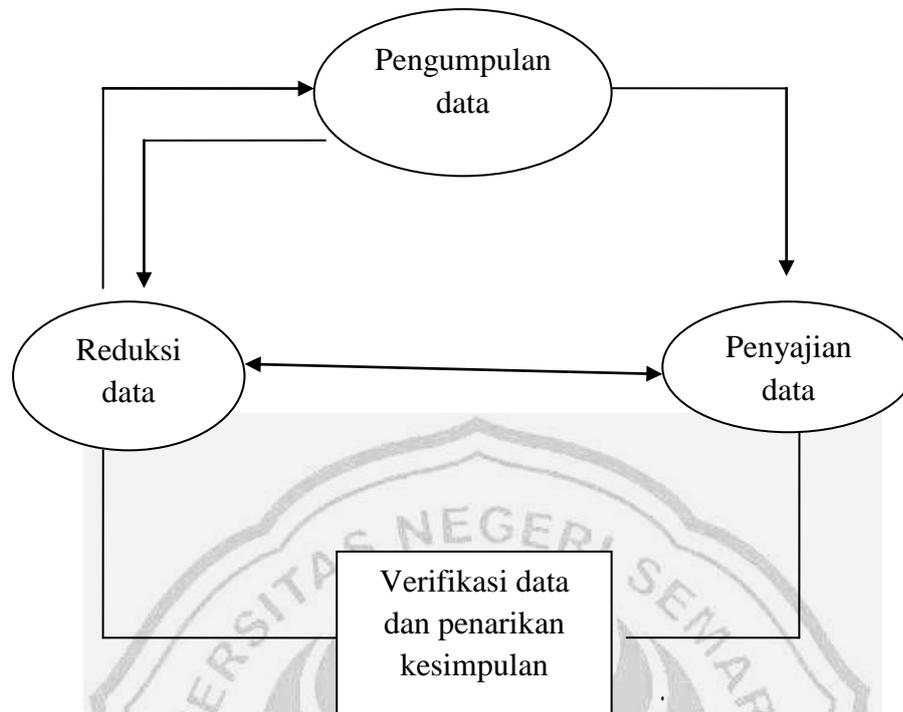
Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

Analisis *deskriptif-kualitatif* merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

Proses pengolahan data merupakan tindak lanjut setelah melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasa masih kurang mantap, maka dilakukan penggalan data kembali. Hal tersebut dilakukan secara berlanjut, sampai penarikan kesimpulan dirasa sudah penelitian. Secara sistematis dijelaskan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut :





Sumber Soetrisno (2001:88)

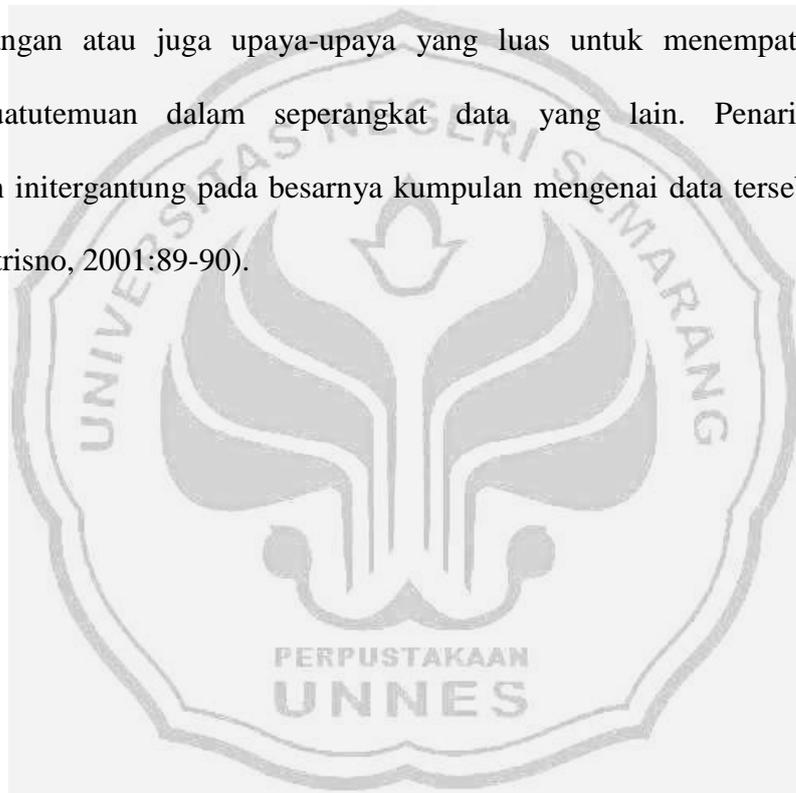
**Gambar 4 Model Interaktif**

Dijelaskan bahwa :

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi yang tersusun disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan. Tampilan data (*datadisplay*) digunakan untuk memahami apa yang

sebenarnya terjadi, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, yang merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan mengenai data tersebut. (dalam Soetrisno, 2001:89-90).



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Tinjauan geografis dan administratif

Secara Geografis wilayah Kabupaten Pati terletak pada koordinat 6° 25' 41"LS - 7° 24' 35" LS dan 110° 48' 41" BT - 111° 15' 03" BT.

Kabupaten Patimempunyai luas wilayah 150.389 Ha. Batas geografis Kabupaten Pati sebagaiberikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora.

Sebelah Barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.

Wilayah administrasi Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan. Tujuhkecamatan diantaranya merupakan kecamatan pesisir, yaitu Kec. Dukuhseti, Kec.Tayu, Kec. Margoyoso, Kec. Trangkil, Kec. Wedarijaksa, Kec.Juwana, dan Kec.Batangan.Luas wilayah setiap kecamatan seperti tertera pada Tabel.

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Pesisir Kabupaten Pati**

No	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Dukuhseti	8.195	5,43
2.	Tayu	4.759	3,16
3.	Margoyoso	5.997	3,99
4.	Trangkil	4.284	2,85
5.	Wedarijaksa	4.086	2,72

<b>6.</b>	<b>Juwana</b>	<b>5.593</b>	<b>3,37</b>
<b>7.</b>	<b>Batangan</b>	<b>5.066</b>	<b>3,37</b>
<b>Jumlah</b>		<b>37.942</b>	<b>25,23</b>
<b>Luas Kabupaten Pati</b>		<b>150.368</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Pati (2010)*

Desa Asempapan memiliki luas wilayah 247 ha atau 0,16 % dari luas wilayah Kabupaten Pati, dengan batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sambilawang

Sebelah Timur : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Desa Tlogoharum

Sebelah Barat : Desa Jetak

Jumlah penduduk tercatat sebanyak 2.732 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.305 jiwa dan perempuan 1.427 jiwa. Komposisi Penduduk menurut usia seperti tertera dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia**

<b>No</b>	<b>Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>1.</b>	<b>00-06 tahun</b>	<b>211</b>	<b>0,09</b>
<b>2.</b>	<b>06-14 tahun</b>	<b>545</b>	<b>0,19</b>
<b>3.</b>	<b>14-65 tahun</b>	<b>1850</b>	<b>0,67</b>
<b>4.</b>	<b>65 tahun keatas</b>	<b>126</b>	<b>0,05</b>
<b>Jumlah</b>		<b>2732</b>	<b>100,0</b>

*Sumber : Monografi Desa Asempapan 2012*

Berdasarkan tabel komposisi menurut kelompok usia di atas dapat diketahui mayoritas terdapat pada usia produktif yaitu antara 14– 65 tahun sebanyak 1850 jiwa dengan persentase sebesar 0.67%.Dilihat dari tingkat pendidikan, masyarakat di Desa Asempapan yang lulusan sekolah dasar

hanya berjumlah 731 orang atau 0.28 % Dengan demikian maka tingkat pendidikan di wilayah studi masuk dalam kategori cukup baik karena jumlah persentase masyarakat yang tingkat pendidikannya lulusan SMP dan SMA dan Akademisi hampir mengimbangi jumlah persentase masyarakat yang tidak pernah sekolah, tidak tamat SD dan tamat SD . Secara terperinci tingkat pendidikan penduduk di Desa Asepapan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Asepapan**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak/Belum pernah sekolah	48	0.02
2.	Tidak/Belum tamat SD	501	0.20
3.	Tamat SD/MI	731	0.28
4.	Tamat SMP/MTS	483	0.19
5.	Tamat SMA/SMK/MA	618	0.25
6.	D1/D2/D3	36	0.01
7.	S1	67	0.03
<b>Jumlah</b>		<b>2484</b>	<b>100,00</b>

Sumber : *Monografi Desa Asepapan 2012*

Dan penduduk Desa Asepapan 100% beragama Islam.

#### **4.1.2. Produksi garam di Desa Asepapan**

Lahan garam di Kecamatan Trangkil tercatat seluas 288,68 Ha, dimana 66.13 ha berada di Desa Asepapan. Produksi garam rakyat tersebut sangat bergantung pada musim, jika musim kemarau panjang maka produksi dapat meningkat. Produksi garam berkisar antara 80 ton/ha/tahun. Berdasarkan luas lahan yang ada maka kapasitas produksi garam di Desa Asepapan pada tahun 2012 mencapai 5292.01 ton/tahun.

Petani garam di Desa Asempapan pada umumnya merupakan petani tradisional dengan kepemilikan areal relatif kecil. Proses produksi dengan cara kristalisasi serta waktu panen yang relatif singkat menyebabkan kualitas garam yang dihasilkan menjadi rendah. Produksi garam rakyat di Desa Asempapan pada umumnya adalah garam krosok (garam tradisional) yang termasuk kualitas II dengan kandungan NaCl  $\pm 80\% - 90\%$ . Sesuai dengan persyaratan dalam SNI maka bahan baku garam yang diproduksi minimal memiliki kadar NaCl sebesar 94,7 %

### **B. Pengelompokan Industri Garam**

Berdasarkan perdagangan Internasional, industri garam dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Garam Meja (*Table Salt*) dengan HS 2501.00.100 adalah garam hasil olahan dengan tingkat kualitas *food grade*, kadar NaCl lebih dari 97 % H<sub>2</sub>O kurang dari 1 %. Garam ini dihasilkan dari rekristalisasi (*refinery*) garam umumnya sudah dalam bentuk halus dan mengandung bahan tambahan seperti yodium, senyawa anti gumpal (*anti cacking*) sehingga kristal garam bebas mengurai dan bebas mengalir (*free flowing*) dan tidak menggumpal. Umumnya garam ini dikemas dalam kemasan yang baik, seperti plastik, botol, maupun karton.
- 2) Garam Curah (*Salt in Bulk*) dengan HS 2501.00.2900 adalah garam tambang, tidak diproses atau larutan air. Umumnya jenis garam ini dalam bentuk curah, merupakan bahan baku untuk industri Soda Kostik (*Chlore Alkali Plant -CAp*) atau bahan baku untuk industri

garam konsumsi beryodium. Kualitas garam ini adalah *industrial grade* dengan NaCl lebih dari 98 % maupun *common salt* dengan NaCl 95 -97 %. Garam lainnya (*Other Salt*) dengan HS 2501.00.900 meliputi garam farmasi (*pharmaceutical salt*) atau garam untuk keperluan analisa laboratorium (*laboratory salt pure analysis - p.a*). jenis ini merupakan garam dengan kualitas NaCl sangat tinggi yaitu lebih dari 99 %.

### 3) Garam Bahan Baku dan Garam Olahan

a Garam bahan baku adalah garam yang berasal dari pungutan langsung di ladang (tambak) garam yang belum dicuci maupun sudah dicuci dan belum diproses lanjut menjadi garam beryodium atau garam kemasan. Garam bahan baku ini terdiri dari bahan baku untuk industri garam konsumsi beryodium (SNI 01-4435-2000) dan garam bahan baku untuk industri Chlor Alkali Plan (CAP) Industri Soda Kostik.

b Garam olahan adalah garam bahan baku yang sudah diproses lanjut menjadi garam beryodium ataupun garam kemasan baik untuk keperluan konsumsi maupun industri.

c Garam beryodium adalah garam konsumsi yang mengandung komponen utama natrium khlorida (NaCl) minimal 94,7%, air maksimal 7% dan Kalium Vodat (KI03) minimal 30 ppm serta senyawa-senyawa lainnya sesuai Standar Nasional Indonesia 01 - 3556.2 -2000.

### 4.1.3. Jenis Garam

#### 1). Garam konsumsi

Garam Konsumsi yaitu garam dengan kadar Natrium Chlorida minimum 94,7% atas dasar berat kering -adbk-(dry basis), dengan kandungan impuritis Sulfat, Magnesium dan Kalsium maksimum 2 % dan sisanya adalah kotoran (lumpur, pasir). Kadar air maksimal 7 %.

Garam konsumsi ini masih dibagi menjadi 3 jenis : food grade, medium grade dan low grade

- Food atau high grade yaitu garam konsumsi mutu tinggi dengan kandungan NaCl 97 %, kadar air dibawah 0,05 %, warna putih bersih, butiran umumnya berupa kristal yang sudah dihaluskan. Garam jenis ini digunakan untuk garam meja, industri penyedap makanan (bumbu masak, masako dl/), industri makanan mutu tinggi (makanan camilan : Chiki, Taro, supermi dan sebagainya), industri sosis dan keju, serta industri minyak goreng.
- Medium grade yaitu garam konsumsi kelas menengah dengan,kadar NaCl 94,7% -97% dan kadar air 3 -7 % untuk garam dapur, dan industri makanan menengah seperti kecap, tahu, pakan ternak.Low grade, yaitu garam konsumsi mutu rendah dengan kadar NaCl 90 - 94.7 %, kadar air 5 -10 %, warna putih kusam, digunakan untuk pengasinan ikan dan pertanian.

#### (2) Garam Industri Perminyakan

Garam Industri Perminyakan yaitu yang mempunyai kadar NaCl antara 95 sampai 97% (dry basis), impurities Sulfat maksimum 0.5 %, dan kadar air maksimum 10 %.

impuritis Calcium maksimum 0.2% dan impuritis Magnesium maksimum 0,3 % dengan kadar air 3%-5%. Garam industri jenis ini disebut garam Industri Perrninyakan karena umumnya dipakai di Industri perminyakan.

Didalam industri perminyakan garam mempunyai 2 kegunaan :

- Untuk penguat struktur sumur pengeboran agar sumur pengeboran tidak longsor.
- Untuk bahan pembantu membuat uap yang digunakan dalam pengeboran minyak secondary atau tertiary drilling method

### (3) Garam Industri Lainnya.

Garam Industri Lainnya yaitu garam yang digunakan didalam industri kulit, industri tekstil, pabrik es dan lain sebagainya. Garam ini mempunyai kadar NaCl > 95% (dry basis), impurities Sulfat Lampiran Peraturan Menteri Perindustri Nomor: 134/M-IND/pEB/IO maksimum 0.5%, impuritis Calcium maksimum 0.2% dan impuritis Magnesium maksimum 0,3 % dengan kadar air 1 %-5%.

### (4) Garam Industri Chlor Alkali Plant (CAP) dan Industri Farmasi,

Yaitu garam dengan kadar Natrium Chlorida diatas 98,5 % dengan impuritis Sulfat, Magnesium, Kalium dan kotoran (insoluble matter) yang sangat kecil. CAP (Chlor Alkali Plant) Industrial Salt atau garam Industri untuk industri Soda-Klor, yaitu garam yang mempunyai kadar NaCl diatas 98,5 % (dry basis), impurities Sulfat maksimum 0.2 %, impuritis Calcium maksimum 0.1 % dan impuritis Magnesium maksimum 0,06 %. Garam ini digunakan untuk proses kimia dasar pembuatan soda dan klor. Pharmaceutical Salt yaitu garam industri yang mempunyai kadar NaCl

diatas 99,5% dengan kadar impuritis mendekati 0. Garam ini digunakan dalam industri pharmasi antara lain untuk pembuatan cairan infus serta cairan untuk mesin cuci ginjal dan dijadikan garam murni untuk analisa kimia ( pure analysis-p.a.) untuk keperluan analisa di laborator. Garam juga mudah untuk diperdagangkan oleh setiap pedagang atau pengecer dengan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat luas, baik oleh pedagang besar (seperti supermarket) atau pedagang kecil (seperti warung). Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden RI No. 69 Tahun 1994 tanggal 13 Oktober 1994 tentang Pengadaan garam beryodium, maka telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 77/M/SK/5/1995 tanggal 4 Mei 1995 tentang Persyaratan teknis pengolahan, pengawasan dan pelabelan garam beryodium, maka perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut mencakup prinsip dasar proses produksi dan pengendalian mutu pengolahan garam serta tata cara perizinan. Sehingga dipandang perlu adanya petunjuk teknis sebagai pedoman dalam rangka pengadaan garam beryodium yang memenuhi syarat, yaitu antara lain :

1. Proses Produksi untuk memberikan gambaran tentang pembuatan garam beryodium dengan menitikberatkan pada pencucian, pengeringan/ penirisan, yodisasi dan pengemasan.
2. Sistem Pengendalian Mutu untuk memproduksi garam beryodium sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-3556-1994.
3. Perizinan untuk menginformasikan kepada perusahaan garam beryodium maupun calon investor tentang cara memperoleh perizinan usaha industri.

Sortasi Bahan Baku Adalah proses pemilihan bahan baku garam rakyat yang kondisinya tidak seragam, tergantung dari teknik pembuatannya. Dari lamanya proses penguapan/kristalisasi digolongkan menjadi garam muda dan garam tua. Garam muda adalah proses penguapan air laut pada meja-meja kristalisasi yang dilakukan secara total (hampir tidak ada sirkulasi air) dengan waktu yang relatif pendek, sehingga hanya diperoleh garam dengan kadar NaCl yang rendah dan mengandung kadar Ca dan Mg yang relatif tinggi serta cenderung kotor (impuritas tinggi). Sedangkan garam tua adalah garam yang diperoleh dengan proses pengkristalan yang memadai pada kondisi kepekatan antara 24-25 Be (Be adalah derajat kepekatan suatu larutan yang dapat diukur dengan alat Hidrometer atau Baumeter). Secara bertahap sesuai dengan tingkat kepekatan larutan dan proses kristalisasi akan diperoleh:

- ” Garam Kualitas I, merupakan hasil proses kristalisasi pada larutan 24-29,5 Be dengan kadar NaCl minimal 97,1 %.
- ” Garam Kualitas II, merupakan sisa kristalisasi di atas pada kondisi kelarutan 29,5-35 Be dengan kadar NaCl minimal 94,7%.
- ” Garam Kualitas III, merupakan sisa larutan kepekatan di atas pada kondisi >35 Be dengan kadar NaCl <94,7%.

Pada kondisi ini akan diperoleh garam dengan kadar impuritas yang cukup tinggi sehingga garam menjadi kotor karena unsur-unsur ikutan seperti bromida, magnesium, kalium dan sulfat, pada larutan semakin sulit

terpisahkan dari senyawa NaCl. Dari sisi kinerja-nya ada berbagai tingkatan warna garam mulai dari warna putih transparan, putih dop dan putih kecoklatan yang dipengaruhi oleh kadar kotoran dan kadar impuritas. Kotoran pada garam menyebabkan menurunnya mutu garam yaitu rendahnya kadar NaCl, sehingga pada garam yang kotor perlu dilakukan pencucian untuk mendapatkan garam sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagai bahan baku pembuatan garam konsumsi beryodium.

A. Perluasan Industri Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang diizinkan sesuai Izin Usaha Industri yang dimiliki, diwajibkan memperoleh Izin Perluasan. Untuk perusahaan Penanaman Modal Asing, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, juga No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing serta peraturan pelaksanaannya, setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Izin Usaha Industri dan Perluasan bagi industri pengolahan garam beryodium diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan setelah memiliki sertifikat SNI dan Surat Penunjukan dari Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH). Indonesia telah memiliki 11 wilayah sentra produksi garam, yaitu Pati, Rembang, Demak (Jateng), Indramayu dan Cirebon (Jabar), Sampang, Pamekasan, Pasuruan (Jatim), Jenepono (Sulsel), Bima (NTB), dan Kupang (NTT). Total Produksi garam nasional tahun 2010 mencapai 1.265.600 ton. Tahun 2012 produksi naik menjadi

1,6juta ton. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen merupakan garam kelas dua dan tiga, sedang sisanya merupakan garam industri

#### 4.2.Deskripsi Kondisi Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dari total 300 orang petambak garam yang menerima bantuan ini, untuk mendapatkan dana bantuan ini dibentuklah 24 kelompok dari 300 orang tersebut dan didampingi oleh tim pendamping yang telah ditunjuk kepala Desa. Dari 30 responden tersebut sudah representatif untuk mewakili para petambak garam, karena semua petambak garam mempunyai kendala yang sama dalam proses produksi garam yaitu ketersediaan air.

##### 4.2.1. Pengalaman responden menjadi Petambak Garam

Berapa lama pengalaman responden menjadi petambak garam dapat dilihat dari table berikut :

**Tabel 4.4**  
**Pengalaman Responden menjadi Petambak Garam**

No	Lama Pengalaman (tahun)	Jumlah (orang)
1.	21-30	7
2.	11-20	10
3.	0-10	13
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>

Sumber : Data primer yang diolah

Sesuai tabel diatas diketahui, bahwa 7 responden penelitian mempunyai pengalaman bertambak garam selama 21-30 tahun.10 orang

responden memiliki pengalaman bertambak garam selama 11-20 tahunan 13 orang responden mempunyai pengalaman selama 0-11 tahun. Pengalaman responden menjadi petambak garam sangat membantu petambak garam dalam proses produksi ( pembuatan ) garam. Semakin lama pengalaman yang dimiliki petambak garam maka akan semakin meningkat kemampuan yang dimiliki. Walaupun dalam hal ini, pengalaman bukanlah faktor yang dominan atau penting dalam kegiatan bertambak garam.

#### 4.2.2. Umur responden

Berdasarkan data hasil penelitian , maka untuk kondisi umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**

**Jumlah Responden Menurut Umur**

No	Usia ( tahun )	Jumlah ( orang )
1.	> 50 tahun	4
2.	40-50 tahun	7
3.	30-40 tahun	13
4.	20-30 tahun	6
Jumlah		30

Sumber: Data primer yang diolah

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan sebanyak 4 orang berusia diatas 50 tahun. 7 orang berusia antara 40-50, lalu 13 orang berusia antara 30-40 tahun dan 6 orang berusia antara 20-30 tahun.

Dari data hasil penelitian tentang umur responden, dapat diketahui bahwa sebagian besar petambak garam berusia antara 30-40 tahun. Menurut

Hernanto umur responden dapat mempengaruhi kemampuan fisik dalam bekerja, karena responden yang berusia produktif akan lebih mendukung dalam usaha ini. Usia dibawah 40 tahun adalah usia produktif bagi seseorang dalam mengembangkan usaha. Hal tersebut menunjukkan pula, bahwa minat warga berusia muda sangat besar terhadap usaha ini.

#### 4.2.3. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan responden dapat berpengaruh terhadap pola pikir dan daya serap petambak garam terhadap inovasi teknologi pertanian. Tingkat pendidikan responden selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**

**Tingkat Pendidikan Responden**

No	Pendidikan	Jumlah ( Orang )
1.	SMA/MA	11
2.	SMP/MTS	10
3.	SD/MI	7
4.	Tidak Sekolah	2
Jumlah		30

Sumber: Data primer yang diolah

Data responden menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden adalah tamat SMA/MA, melihat tingkat pendidikan yang cukup baik, maka tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan responden dalam mengembangkan usaha ini.

#### 4.2.4 Jumlah produksi garam responden

**Tabel 4.7 Jumlah produksi garam pada saat panen**

No	Jumlah produksi	Luas lahan (ha)	Jumlah orang (responden)
1.	75-150 kg	1 ha	12
2.	150-200 kg	1 ha	5
3.	200-250 kg	1 ha	9
4.	250-300 kg	1 ha	4

*Sumber : Data primer yang diolah*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 12 responden yang menghasilkan garam sekali panen sebesar 75-150 kg pada lahan seluas 1 ( satu ) hektar. Dari data diatas juga dapat dilihat terjadi jumlah produksi yang berbeda tiap petambak garam walaupun dengan luas lahan yang sama. Ada beberapa faktor penyebabnya: pertama adalah ketersediaan air, ke 4 responden dengan jumlah produksi 250-300 kg mempunyai lahan tambak garam yang dekat dengan laut. Ke 4 orang tersebut juga mempunyai pengalaman yang tinggi dalam usaha produksi garam sehingga mereka lebih mengetahui hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan produksi garam.

#### 4.3. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Program PNPM KP PUGAR ( program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan pemberdayaan usaha garam rakyat) di Desa Asempapan tahun 2011 dan 2012

Mekanisme penyaluran dana bantuan PNPM KP PUGAR di Desa Asempapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini kementerian

kelautan dan perikanan republik Indonesia.berikut adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER/06/Men/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan tahun 2012 yang berkaitan tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran dana bantuan PNPM KP PUGAR

A. pengusulan calon lokasi dan penerima PUGAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Dinas Kabupaten/Kota, Tim Teknis, dan Tenaga Pendamping melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon lokasi dan calon penerima BLM PUGAR;
- 2) berdasarkan hasil identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon lokasi dan calon penerima BLM PUGAR, Tenaga Pendamping dan Tim Teknis mengusulkan calon lokasi dan calon penerima BLM PUGAR kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, untuk selanjutnya Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan penetapan lokasi dan penerima BLM PUGAR;
- 4) Untuk lokasi sasaran dan penerima BLM PUGAR 2011,Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat menetapkan kembali sebagai lokasi sasaran dan penerima BLM PUGAR 2012;
- 5) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Penetapan Lokasi dan Penerima BLM

PUGAR kepada Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selaku koordinator Pokja PUGAR).

- 6) Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil selaku koordinator PUGAR melaporkan penetapan lokasi dan penerima BLM PUGAR kepada Tim Koordinasi; dan
- 7) apabila dalam proses pengusulan dan penetapan, ditemukan penyimpangan dari Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis PUGAR, maka Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat meminta Dinas Kabupaten/Kota pengusul untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sesuai ketentuan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis PUGAR.

B. pengusulan calon lokasi dan penerima BLM PUGAR dari aspirasi masyarakat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- usulan calon kelompok penerima BLM PUGAR dari aspirasi masyarakat disampaikan ke Pokja PUGAR;
- Pokja menginventarisir usulan calon kelompok penerima BLM PUGAR untuk dilanjutkan ke Dinas Kabupaten/Kota;
- Dinas Kabupaten/Kota, Tim Teknis, dan Tenaga Pendamping melakukan verifikasi calon lokasi dan calon penerima BLM PUGAR kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan penetapan lokasi dan penerima BLM PUGAR;
- Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Penetapan Lokasi dan Penerima BLM PUGAR

kepada Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selaku koordinator Pokja PUGAR);

- Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil selaku koordinator PUGAR melaporkan penetapan lokasi dan penerima BLM PUGAR kepada Tim Koordinasi; dan
- apabila dalam proses pengusulan dan penetapan, ditemukan penyimpangan dari Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis PUGAR, maka Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat meminta Dinas Kabupaten/Kota pengusul untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sesuai ketentuan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman.

### C. Tata Cara dan Prosedur Penyaluran BLM PUGAR

#### 1. Penyusunan RUB dan Dokumen Administrasi

Proposal RUB harus mengakomodasikan kebutuhan petambak garam rakyat, pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan dan pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga anggota KUGAR dalam kegiatan usaha garam rakyat dan pengolah garam skala mikro-kecil;

Penyusunan proposal RUB dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Proposal RUB disusun oleh KUGAR dibantu oleh Tenaga Pendamping;
- b. Proposal RUB bersama dokumen administrasi pendukung diusulkan kepada Tim Teknis;
- c. Tim Teknis dan Tenaga Pendamping melakukan seleksi proposal RUB calon penerima BLM PUGAR.

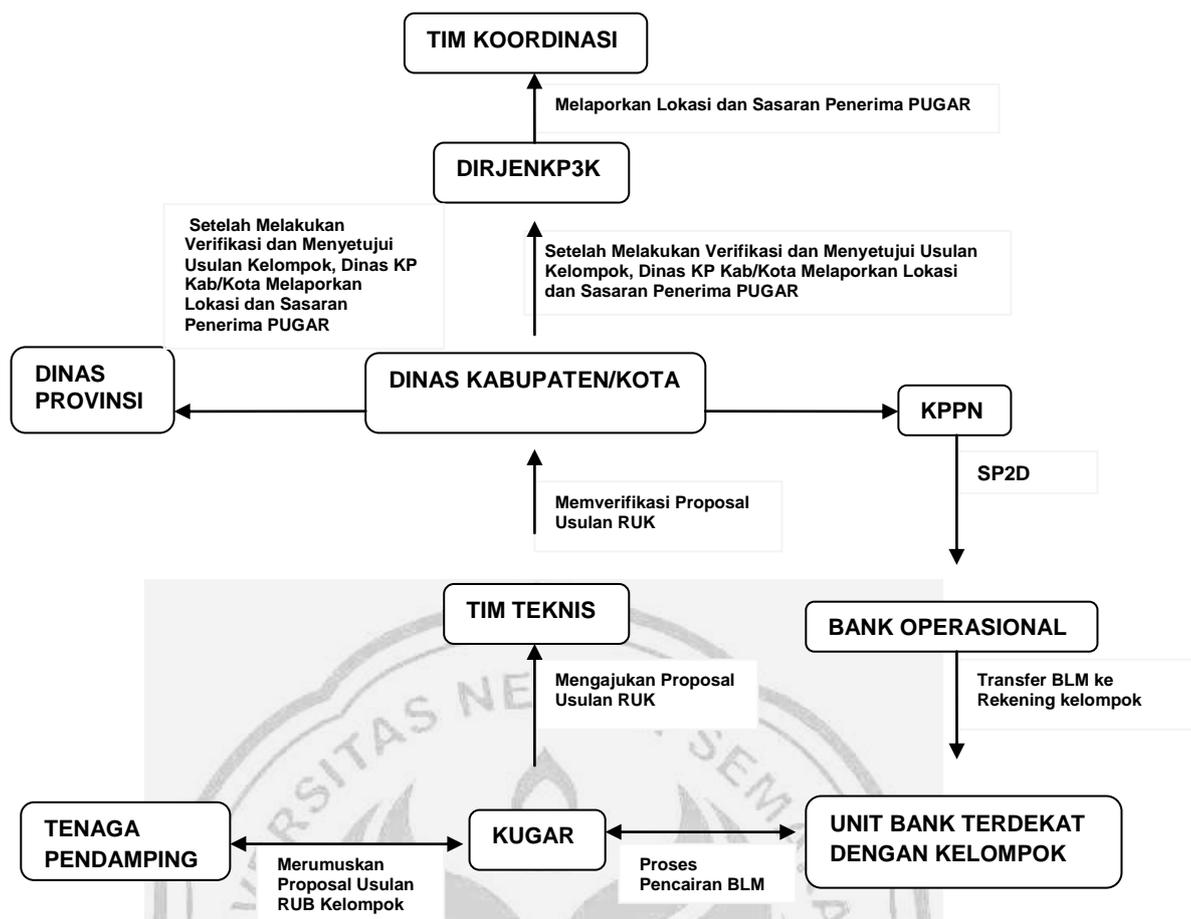
## 2. Verifikasi RUB dan Dokumen Administrasi

- a. Tim Teknis melakukan verifikasi Proposal Rencana Usahan Bersama (RUB) dan dokumen administrasi pendukung yang terdiri atas:
  - 1) Data KUGAR (nama ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, umur, jenis kelamin, alamat, petambak penggarap, pemilik penggarap/penyewa, dan lain-lain);
  - 2) Nomor Rekening KUGAR atas nama kelompok;
  - 3) Berita Acara Hasil Identifikasi, seleksi dan verifikasi KUGAR Calon Penerima BLM PUGAR; dan
  - 4) Usulan Surat Perjanjian Kesepakatan tentang Penyaluran BLM PUGAR bermaterai secukupnya.
- b. Tim Teknis mengusulkan hasil verifikasi Proposal RUB dan dokumen administrasi pendukung kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Apabila dokumen tersebut belum memenuhi syarat, maka dikembalikan lagi kepada Tim Teknis untuk diperbaiki dan dilengkapi;
- c. Proposal RUB dan dokumen administrasi pendukung hasil verifikasi yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan diusulkan kembali kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PUGAR.

### B. Prosedur Penyaluran BLM

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses penyaluran BLM kepada KUGAR sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan;

- b. Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dengan lampiran yang ditetapkan dalam Pedoman Teknis PUGAR;
- c. Penyaluran BLM dari KPPN ke rekening KUGAR pada unit bank terdekat melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. BLM dicairkan oleh Ketua, Sekretaris, dan/atau Bendahara KUGAR yang diketahui dan didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota;
- e. KUGAR didampingi Tenaga Pendamping melaporkan secara tertulis atas pemanfaatan BLM kepada Dinas Kabupaten/Kota;
- f. Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasil penyaluran BLM PUGAR kepada Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selaku coordinator Pokja PUGAR) c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil selaku Koordinator Pokja PUGAR melaporkan penyaluran BLM PUGAR kepada Tim Koordinasi selaku Koordinator PNPM Mandiri-KP.



Gambar 5 .Prosedur penyaluran BLM PUGAR

Sumber: Per Men No 6 2012

#### D. Organisasi Pelaksana PUGAR

Organisasi PUGAR di tingkat pusat sama dengan organisasi PUMP yang terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja, sedangkan yang membedakan adalah Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, TenagaPendamping dan KUGAR penerima BLM,

##### 1. Dinas Provinsi

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di Tingkat Provinsi, Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim Pembina PUGAR Tingkat Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Provinsi dengan anggota dari unsur Dinas

Provinsi serta Bappeda yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan di Tingkat Provinsi.

Dinas Provinsi bertugas:

- a. melakukan koordinasi, pembinaan, pendampingan, sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi PUGAR di wilayahnya.
- b. melakukan komunikasi dengan instansi terkait termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat provinsi; dan
- c. mengusulkan Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagai calon penerima PUGAR tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.

## 2. Dinas Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan PUGAR, Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertindak sebagai penanggung jawab operasional PUGAR serta melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guna kelancaran pelaksanaan PUGAR di tingkat Kabupaten/Kota Kepala Dinas Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis PUGAR tingkat Kabupaten/Kota.

Dinas Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menyeleksi dan menetapkan lokasi sasaran, kelompok masyarakat sasaran, Konsultan Pelaksana dan Tenaga Pendamping;
- b. melakukan sosialisasi, publikasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan TKPK Kabupaten/Kota;
- d. mengajukan usulan proposal kegiatan PUGAR tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil melalui Kepala Dinas Provinsi.

### 3. Tim Teknis

Tim Teknis dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Tim Teknis terdiri atas unsur Sekretariat Daerah dan SKPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, pekerjaan umum, perindustrian, kesehatan, perencanaan pembangunan daerah, dan/atau perdagangan, koperasi, dan/atau tokoh masyarakat. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi dapat ditambahkan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi setempat. Tim Teknis bertugas:

- a. melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon kelompok masyarakat;
- b. mengusulkan hasil verifikasi calon KUGAR penerima BLM kepada Dinas Kabupaten/Kota; dan

### 4. Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping PUGAR di tingkat Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri atas 2 (dua) orang, yaitu:

- a. Tenaga Pendamping Kelembagaan

Tenaga Pendamping kelembagaan diutamakan dari tenaga pendamping kegiatan pemberdayaan KKP sebelumnya yang dinilai berkinerja baik sesuai dengan rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota.

b. Tenaga Pendamping Teknis Garam

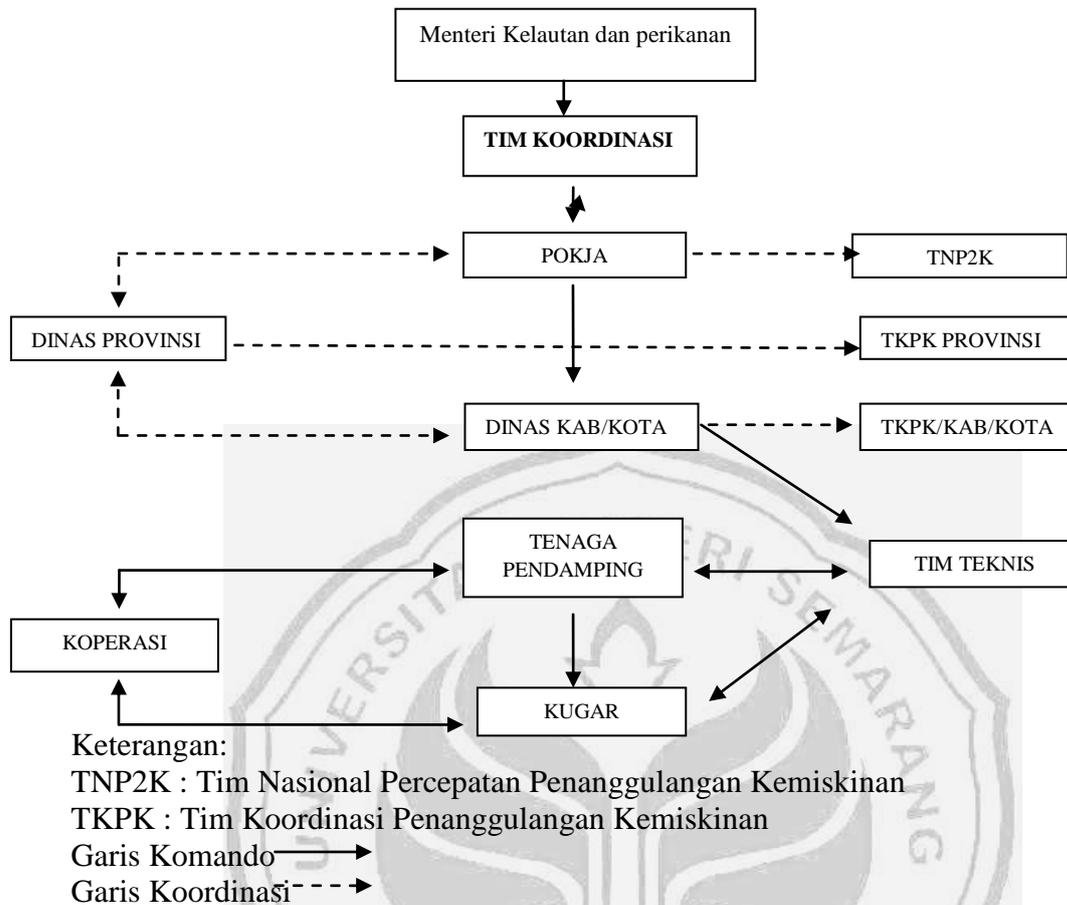
Tenaga Pendamping Teknis Garam diutamakan dari tenaga pendamping dari kegiatan pemberdayaan garam sebelumnya yang dinilai berkinerja baik sesuai dengan rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota.

5. Koperasi

Koperasi berasal dari koperasi LEPP-M3 atau Koperasi Perikanan setempat, atau koperasi garam dan koperasi lainnya yang didukung dengan surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota yang menangani koperasi. Koperasi berperan sebagai penyangga hasil produksi garam rakyat.

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Koperasi meliputi:

- a. Menyediakan sarana produksi bagi KUGAR;
- b. Membeli garam hasil produksi KUGAR dengan harga yang sesuai



**Gambar.6 Organisasi Pelaksana PUGAR**

*Sumber: Per Men No 62012*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kenyataannya mekanisme penyaluran dana bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, memang pada tahap pengadaan dana bantuan masyarakat (petambak garam) tidak dilibatkan secara langsung. Karena dalam tahap ini semua telah diakomodir oleh kementerian kelautan dan perikanan sebagai pembuat kebijakan. Oleh karena itu masyarakat (petambak garam) tidak memahami mekanisme pada tahap ini, mulai dari program dana bantuan ini direncanakan hingga diterbitkannya Peraturan Menteri no 6 tahun 2012. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap penyaluran dana bantuan PNPM KP PUGAR

masyarakat (petambak garam) tidak semua mengetahui alur mekanisme pemberian dana bantuan karena hanya ketua kelompok saja yang mendapatkan pengarahan dan sosialisasi langsung dari tim pengelola yang dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Pada tahap ini tim pengawas mengumpulkan ketua kelompok untuk menjelaskan mengenai program dana bantuan pugar dan mekanisme penyaluran dana bantuan pugar dan bagaimana masyarakat petambak garam desa Asempapan memperoleh dana bantuan ini. Di dalam mekanisme tersebut dijelaskan bahwa petambak garam diharuskan membuat proposal sebagai syarat untuk menerima bantuan tersebut, yang isinya mengenai keinginan para petambak garam dalam memanfaatkan dana bantuan tersebut. Setelah itu proposal tersebut dikumpulkan secara kolektif oleh tim pendamping dan diserahkan ke tim pengawas untuk dikoreksi, dievaluasi dan selanjutnya disetujui oleh kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pati.

Pada tahap pencarian dana bantuan ketua kelompok harus membuat rekening bank pada bank yang telah ditunjuk agar dana tersebut dapat langsung diterima oleh petambak garam di Desa Asempapan. Ini dilakukan supaya dana bantuan dapat diterima oleh petambak garam secara utuh dan dimanfaatkan sendiri oleh para petambak garam

Menurut survei dan wawancara yang dilakukan, sebagian besar masyarakat (petambak garam) menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai program PUGAR dan proses pemberian dana bantuan karena pada waktu itu sosialisasi hanya dilaksanakan sekali dan tidak semua masyarakat (petambak garam) mengikuti sosialisasi tersebut. Pada waktu itu

hanya ketua kelompok, tim pendamping dan kepala desa saja yang mengikuti sosialisasi yang diadakan Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga kebanyakan masyarakat mengetahui dari mulut ke mulut tentang Program ini. Hal tersebut seperti yang disampaikan bapak Sunarso kepala Desa Asempapan. Berikut adalah petikan wawancara dengan Bapak Sunarso Kepala Desa Asempapan

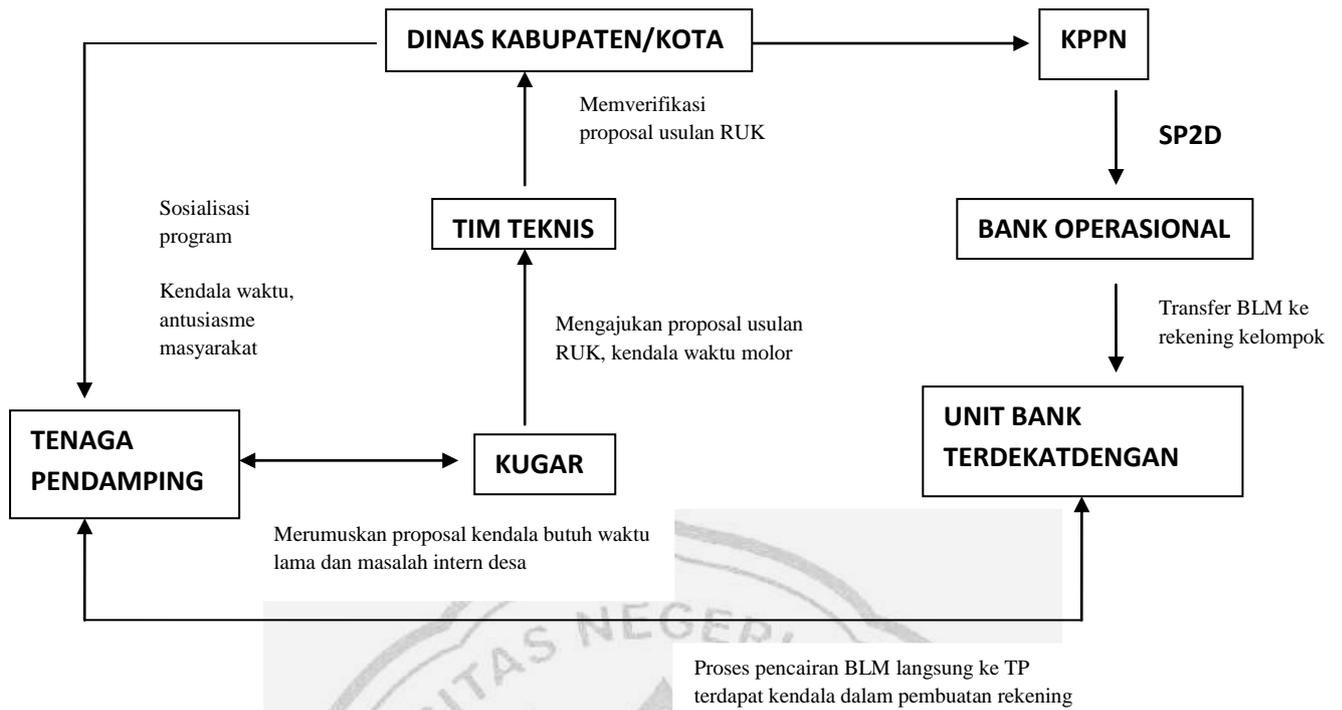
*“memang dalam kenyataannya pemberian informasi tentang bantuan PNPM KP PUGAR tidak terlalu jelas, ada memang sosialisasi tapi banyak yang tidak tahu dan tidak mengikuti. Petambak garam mengetahui dari saya dan ketua kelompok, itupun kalau ada yang Tanya” ( wawancara 3 februari 2013 )*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak sohih selaku tim pendamping di Desa Asempapan. Berikut petikan wawancara dengan bapak sohih

*“ yang datang waktu sosialisasi hanya ketua kelompok, saya dan pak kades saja, petambak garam banyak yang tidak datang, walaupun undangan telah disebar” ( wawancara 3 februari 2013 )*

Sedangkan menurut bapak Ari kasi pengembangan wilayah pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pati tahapan sosialisasi telah dilakukan sesuai dengan Per Men No 6 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan tahun 2012. Beliau menambahkan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat.

*“tahap sosialisasi telah dilaksanakan oleh Dinas kelautan dan Perikanan, tetapi masyarakat kurang antusias, mungkin disebabkan karena mereka lebih memilih bekerja daripada datang. Toh nantinya mereka akan diberitahu oleh kepala desa atau tim pendamping” ( wawancara 5 februari 2013)*



**Gambar. 7**

**Mekanisme penyaluran Dana Bantuan Pugar di Desa Asempapan tahun 2011-2012**

Dari gambar diatas, dapat di lihat terjadi perbedaan antara mekanisme yang terdapat pada Per Men No 6 tahun 2012 dengan mekanisme penyaluran dana bantuan yang dilaksanakan di Desa Asempapan. Pada mekanisme yang terjadi di Desa Asempapan menunjukan bahwa pada proses pencairan dana bantuan terdapat kendala pada pembuatan rekening oleh masing-masing ketua kelompok Pugar sehingga dana bantuan langsung disalurkan ke Tim pendamping dengan persetujuan dari semua kelompok Pugar. Dari skema diatas dapat dilihat juga bawa Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi ke petambak garam lewat Tenaga pendamping. Sosialisasi tersebut kurang begitu berhasil karena adanya beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya antusias petambak garam dalam mengikuti sosialisasi di karenakan waktu sosialisasi yang bersamaan dengan mereka bekerja.

#### **4.4 Manfaat Program Dana Bantuan terhadap peningkatan produksi garam dan peningkatan pendapatan petambak garam di Desa Asempapan**

Jumlah dana bantuan PUGAR di kabupaten Pati tahun 2011 sebesar Rp 5.435.000.000 dan disalurkan di 18 desa dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya yaitu Rp 9.300.000.000 dan di salurkan ke 20 desa penghasil garam, dan di desa Asempapan dana yang disalurkan pada tahun 2011 sebesar 225 juta dan di tahun 2012 sebesar 325 juta yang disalurkan pada 300 petambak garam di desa Asempapan.

Setiap petani garam mendapatkan Rp 1.400.000 dengan rincian Rp 1.000.000 untuk membeli pompa air dan Rp 400.000 sebagai iuran untuk pengerukan sungai, pelebaran dan pengaspalan jalan. pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan bapak Sohih selaku tim pendamping petambak garam Desa Asempapan. Berikut adalah petikan wawancara dengan bapak Sohih:

*“ Dana bantuan yang diterima petambak garam dalam bentuk uang senilai Rp 1.400.000 per orang. Rp 1.000.000 dibelikan pompa air dan sisanya sesuai keputusan bersama untuk iuran pengerukan sungai dan pelebaran serta perbaikan jalan ” (wawancara 3 februari 2013)*

Manfaat yang dirasakan para petambak garam menurut survei dan wawancara dengan responden adalah terbantunya Petambak garam untuk melekukan kegiatan produksi garam tanpa terhenti, ini disebabkan dana bantuan ini dipergunakan oleh petambak garam untuk membeli pompa air yang digunakan untuk mengalirkan air dari laut. Hal ini dilakukan karena dalam dua sampai tiga tahun terakhir di kabupaten pati terjadi kemarau

panjang sehingga pasokan air untuk produksi garam menjadi sedikit, hal inilah yang menjadi dasar pemikiran oleh para petani garam dengan mengusulkan kepada tim yang dibentuk dinas kelautan dan perikanan kabupaten pati. Selain itu manfaat lain yang dirasakan petambak garam dari adanya bantuan Dana PNPM KP PUGAR ini adalah bertambahnya pendapatan para petambak garam.

**Tabel 4.8 peningkatan produksi dan pendapatan**

	Tahun	Jumlah Produksi (ton)	Harga yang berlaku (saat panen)	Total Pendapatan
Sebelum ada bantuan	2010	3270.12	Rp 450/kg	Rp 1.471.555.000
Sesudah ada bantuan	2011	4528.21	Rp 450/kg	RP 2.037.694.500
Bantuan tahun ke dua	2012	5292.01	Rp 450/kg	RP 2.381.404.500

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pendapatan dan produktifitas petambak garam dari sebelum petambak garam mendapatkan bantuan dengan sesudah mendapatkan bantuan. Tahun 2010 adalah sebelum adanya Program Dana Bantuan. Tersedianya air merupakan faktor utama yang menjadikan para petambak garam bisa tetap produksi garam sepanjang musim panen garam.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Mulyono petambak garam di desa Asempapan. Berikut petikan wawancara dengan bapak Mulyono

*“ Petambak garam sangat terbantu mas, dengan adanya bantuan ini saya dapat terus garuk (panen) karena tidak kekurangan air” ( wawancara 5 februari 2013)*

Pendapat lain dikemukakan bapak Solkhan petambak garam di Desa Asempapan. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Solkhan

*“ Saya g pusing lagi mas untuk cari air,pompa ini sangat membantu, saya nyedot langsung dari laut. selain itu bisa juga untuk menguras lahan garam ketika banjir” (wawancara 6 februari 2013)*

#### **4.5. Kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya dalam Program Penyaluran Dana Bantuan dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat**

Dalam Proses Implementasi Program Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR di Desa Asempapan pada kenyataannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi. Ada beberapa kendala yang terjadi dalam proses Implementasi program ini tapi hal ini tidak menjadikan proses ini menjadi terhenti.

Seperti diungkapkan bapak Sohik selaku tim pendamping di Desa Asempapan. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Sohik

*“ masalah yang dialami petambak garam ini waktu pembuatan proposal, karena banyak orang jadi harus menyamakan usul dari petambak garam,ada yang minta ini lah, itu lah pokoknya ribet mas. Terus pak kades berinisiatif dengan memberikan beberapa opsi salah satunya pembelian pompa air, akhirnya mereka setuju” ( wawancara 3 februari 2013)*

Hal senada diungkapkan oleh bapak Ari Kasi Pengembangan wilayah pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Berikut petikan wawancara dengan bapak Ari

*“Terkait kendala yang ada dalam Program Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR di Desa Asempapan salah satunya adalah pembuatan proposal dari info yang kami peroleh petambak garam kesulitan dalam menentukan penggunaan dana tersebut, sehingga mereka tidak tepat waktu dalam menyerahkan proposal” (wawancara 4 februari 2013)*

Selain kendala tersebut juga ditemui dalam hal pembuatan rekening sebagai syarat untuk menyalurkan dana bantuan. Banyak yang tidak

melaksanakan anjuran tim pengawas agar ketua kelompok untuk membuat rekening bank baru. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Bapak Helmi selaku tim Pengawas Program Penyaluran Dana Bantuan

*“ Ada sebagian ketua kelompok yang menggunakan rekening pribadinya, mereka enggan untuk membuat rekening baru. Hal ini menyulitkan kami untuk menyalurkan dana karena rekening bank mereka berbeda (tidak satu bank)” (wawancara 4 februari 2013)*

Kendala lain yang terjadi selama berlangsungnya Program Penyaluran Dana Bantuan adalah sosialisasi yang kurang berjalan dengan baik. Padahal sosialisasi sangat penting karena petambak garam bisa memperoleh informasi secara detail mengenai program ini. Hal ini seperti disampaikan bapak Helmi selaku tim pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Berikut petikan wawancara dengan Bapak Helmi:

*“ sosialisasi kami selenggarakan mulai 3 bulan sebelum dana ini cair ,tapi banyak masyarakat yang kurang antusias, padahal kami telah meminta kepada kepala desa dan tim pendamping untuk mengumumkan acara ini kepada masyarakat”( wawancara 4 februari 2013)*

Hal sedikit berbeda disampaikan Bapak Sunarso selaku Kepala Desa Di Desa Asempapan. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Sunarso

*“ Kami sudah mengumumkan ke masyarakat mengenai akan diadakanya sosialisasi tapi banyak petambak garam yang lebih memilih untuk bekerja, sebenarnya kurang koordinasi saja dan ada miskomunikasi sedikit”(wawancara 4 februari 2013).*

Sedangkan kendala terkait dengan pengembangan usaha garam rakyat berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak terdapat kendala yang berarti. Dengan adanya pompa air ketersediaan air yang merupakan salah satu unsur penting dalam kelancaran usaha ini dapat terpenuhi. Namun

secara umum harus diakui kesulitan dalam usaha pengembangan usaha garam rakyat di Desa Asempapan masih banyak. Usaha masih dalam skala kecil atau masih bersifat usaha sampingan, kualitas garam rendah, tergantung musim, pengelolaan masih bersifat tradisional dan keterbatasan permodalan.

#### 4.6. Pembahasan

Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang dilakukan mengenai Implementasi Penyaluran dana bantuan PNPM KP PUGAR di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tahun 2011 dan 2012 dapat diketahui bahwa, mekanisme program peyaluran dana bantuan telah dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan dalam Permen No 6 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan. Hal tersebut telah sesuai dengan definisi implementasi yang dapat disimpulkan sebagai proses pelaksanaan kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah yang dilaksanakan oleh individual atau pejabat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan keputusan kebijakan tersebut. Solikhin (2004:65) dalam Devita (2007:21).

Sosialisasi dilakukan setelah dilakukan rekomendasi dari dirjen KP3K dengan turunya Per Men No 6 tahun 2012. Menurut bapak Ari kasi pengembangan wilayah pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, hal-hal teknis dalam pelaksanaan sosialisasi tentang dana bantuan PNPM KP PUGAR telah dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan petunjuk dalam Per Men No 6 tahun 2012. Namun sebaliknya dalam proses implementasi kebijakan selalu terbuka akan terjadinya Implementation Gap

yaitu perbedaan antara yang diterapkan dan kenyataan yang didapat. Hal tersebut tercermin dari kenyataan yang terjadi dilapangan dalam proses sosialisasi mengenai program dana bantuan PNPM KP PUGAR kepada masyarakat. Kurangnya waktu sosialisasi dan kurangnya antusiasme petambak garam dalam mengikuti sosialisasi disinyalir menyebabkan informasi yang diterima petambak garam tidak maksimal sehingga banyak petambak garam yang mengetahui dari mulut ke mulut atau dari ketua kelompoknya saja. Inilah yang menghambat kelancaran informasi dalam Program Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR di Desa Asempapan tahun 2011

Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat diajukan Proporsi Minor sebagai berikut:

Mekanisme suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik walaupun telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku apabila tidak ada kordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Manfaat yang dirasakan langsung oleh para penerima bantuan yaitu petambak garam menjadi terbantu akan masalah keuangan atau permodalan yang dihadapi petambak garam untuk melanjutkan usahanya, hal in menjadi sangat penting karena tidak sedikit juga para petambak garam yang berhenti produksi karena terbelit masalah keuangan. menurut moehar Daniel kecukupan modal mempengaruhi ketepatan waktu dalam penggunaan masukan sedangkan kekurangan modal menyebabkan kurangnya masukan yang diberikan sehingga menimbulkan kegagalan atau rendahnya hasil yang diterima.

Para petambak garam menggunakan dana bantuan yang berupa uang tunai untuk membeli pompa air. Dengan adanya pompa air dapat membantu para petambak garam untuk melanjutkan usaha produksi garam mereka yang sebelumnya berhenti sementara karena ketiadaan air. Setelah ada pompa air produksi garam kembali berjalan karena mendapatkan pasokan air langsung dari laut. Produksi garam setelah ada program ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum adanya program ini.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat diajukan proporsi minor II sebagai berikut:

Dana bantuan PNPM KP PUGAR membantu permodalan dan meningkatkan produktifitas petambak garam di Desa Asempapan.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dana bantuan PNPM KP PUGAR dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu kendala teknis yang dihadapi dalam penyaluran Program Dana Bantuan dan kendala terkait pengembangan usaha garam rakyat.

Kendala teknis yang dihadapi dilapangan dalam pelaksanaan program penyaluran dana bantuan ini antara lain kurangnya antusiasme masyarakat atau petambak garam untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pati sehingga banyak petambak garam yang tidak mengerti tujuan program ini dilaksanakan, bagaimana tata cara untuk mendapatkan bantuan ini dan bahkan ada yang tidak tahu mengenai program ini. Kemudian kendala teknis lainnya adalah mengenai

pengumpulan proposal, banyak petambak garam dalam hal ini kelompok yang telah dibentuk terlalu lama dalam pembuatan atau penyusunan proposal sehingga banyak yang terlambat dalam menyerahkan proposal pada waktu yang telah ditentukan sehingga proses pencairan danapun menjadi terlambat. Solusi yang dilakukan oleh tim teknis dinas Kelautan dan Perikanan adalah memberi kelonggaran waktu beberapa hari kepada kelompok tersebut untuk menyelesaikan proposalnya.

Kemudian kendala lain yang terjadi di Desa Asempapan adalah kondisi politik di dalam desa yang kurang kondusif setelah pemilihan kepala desa sehingga terjadi hubungan yang kurang begitu harmonis di masyarakat. Akibatnya sering terjadi kesalahpahaman dan ketidakkompakan petambak garam itu sendiri. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati menyerahkan ke kepala desa untuk mengatasi masalah ini karena Dinas Kelautan dan Perikanan tidak ingin terlibat lebih dalam terhadap masalah intern desa.

Kendala yang dialami oleh dinas Kelautan dan Perikanan antara lain tentang pencairan dana Bantuan, banyak ketua kelompok yang telah ditunjuk sebagai wakil dari para petambak garam tidak melaksanakan anjuran dari tim pengawas dari dinas Kelautan dan Perikanan untuk membuat rekening bank baru di satu bank atau bank yang sama. Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan cukup kesulitan mencairkan dana karena rekening yang dimiliki ketua kelompok berbeda-beda. Solusi untuk pemecahan masalah ini seharusnya Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati membuat kesepakatan dengan Ketua kelompok tentang bank

mana yang telah ditunjuk untuk membuat rekening. Dan memberikan sedikit ancaman kepada para petambak garam yang tidak menjalankan aturan ini dengan tidak mencairkan dana bantuan kepada mereka

Kendala lainnya adalah banyak petambak garam yang mempergunakan bantuan ini untuk kebutuhan pribadi dengan cara menjual pompa air, walaupun kegiatan ini dilaksanakan setelah musim panen garam selesai. Hasil wawancara dengan beberapa responden mengatakan mereka menjual pompa air karena terdesak kebutuhan sehari-hari dan mereka juga yakin tahun depan akan dapat bantuan lagi.

Sedangkan kendala terkait dengan pengembangan usaha garam rakyat berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak terdapat kendala yang berarti. Dengan adanya pompa air ketersediaan air yang merupakan salah satu unsur penting dalam kelancaran usaha ini dapat terpenuhi. Namun secara umum harus diakui kesulitan dalam usaha pengembangan usaha garam rakyat di Desa Asempapan masih banyak. Usaha masih dalam skala kecil atau masih bersifat usaha sampingan, kualitas garam rendah, tergantung musim, pengelolaan masih bersifat tradisional dan keterbatasan permodalan. Solusi mengenai masalah tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk merumuskan suatu kebijakan yang sesuai untuk mengatasi kendala tersebut. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus merangkul semua pihak yang berkepentingan dan perlu adanya sinergi yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk bersama-sama menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor usaha unggulan dimasa depan.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dianjurkan Proporsi minor III sebagai berikut:

Kendala teknis dalam penyaluran dana bantuan dan pengembangan usaha garam rakyat dapat diantisipasi dengan ketaatan, ketekunan, tanggung jawab dan kerjasama yang intensif dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kebijakan, yaitu antara masyarakat (petambak garam), pengusaha dengan pemerintah sebagai pembuat dan pengelola kebijakan.

Berkaitan dengan kendala yang dialami para petambak garam maka perlu adanya upaya peningkatan pola kemitraan yang lebih baik antara petambak garam dengan pemerintah sehingga tujuan untuk meningkatkan produktifitas garam dapat tercapai. Solusi mengenai kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyebaran informasi mengenai adanya program dana bantuan PNPM KP PUGAR kepada petambak garam yaitu perlu adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan petambak garam dalam sosialisasi dan dinas kelautan dan Perikanan supaya lebih gencar dalam memberikan informasi. Dengan cara ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dari masyarakat tentang Program Dana Bantuan PNPM KP PUGAR.

Dengan adanya Program Dana PNPM KP PUGAR maka para petambak garam terbantu dari segi permodalan sehingga diharapkan para petambak garam dapat meningkatkan skala produktifitasnya. Melihat potensi dan kesempatan yang ada para petambak garam dapat mengembangkan usaha ini sehingga permintaan akan garam akan dapat terpenuhi dan dapat mengurangi impor garam. Dalam hal ini pemerintah

juga diharapkan membuat kebijakan yang dapat membantu petani garam untuk mengembangkan usahanya.

Secara teknis pelaksanaan Program penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR di Desa Asepapan masih menemui beberapa kendala. Untuk mengatasinya masing-masing pihak dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan peraturan yang ada. Komunikasi yang baik antara petambak garam dan pemerintah harus lebih ditingkatkan dengan menjalin pola kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Jika dilihat dari pengembangannya, usaha garam rakyat masih bersifat tradisional dan berskala kecil. Padahal apabila usaha ini dikembangkan dengan baik, usaha ini dapat dijadikan sebagai mata pencaharian yang menjanjikan. Oleh karena itu diharapkan peran serta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan agar intensif memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada petambak garam tentang pengembangan usaha garam rakyat secara modern dan lebih baik, agar diperoleh produksi garam yang maksimal dan sesuai standar nasional. Dari proporsi minor I, II, dan III akhirnya dapat diajukan proporsi minor sebagai berikut:

Mekanisme penyaluran dana bantuan PNPM KP PUGAR yang dilaksanakan secara utuh didukung koordinasi antara semua pihak yang terkait dapat meningkatkan pendapatan dan produktifitas usaha garam rakyat.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi program penyaluran dana bantuan PNPM KP PUGAR ( program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri keleutan dan perikanan pemberdayaan usaha garam rakyat ) di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tahun 2011 dan 2012 dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1) Mekanisme program penyaluran dana bantuan PNPM KP PUGAR telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku adapun perbedaan teknis terletak pada pelaksanaan pengumpulan proposal yang dilakukan secara kolektif oleh dinas kelautan dan perikanan kabupaten pati yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan melakukan koreksi proposal agar layak disetujui
- 2) Dana Bantuan PUGAR bermanfaat membantu masalah petani garam dalam hal permodalan dan meningkatkan produktivitas petambak garam di Desa Asempapan. Hal ini dapat di lihat dari meningkatnya produksi garam dan pendapatan petambak garam setelah dilaksanakanya program tersebut.
- 3) Dalam pelaksanaan Program Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR terdapat dua kendala yaitu kendala teknis dalam penyaluran dana bantuan dan kendala dalam pengembangan usaha garam rakyat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR ( Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat ) di Desa Asempapan kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tahun 2011-2012. Saran yang dapat disampaikan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program ini telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Per Men No 6 2012 walaupun ada sedikit perbedaan dalam hal sosialisasi dan penerima pencairan dana. Ini seharusnya dapat di atasi dengan adanya koordinasi yang baik antara semua pihak yang terkait.
2. Perlu adanya lembaga kemitraan antara pemerintah dengan petambak garam sebagai wadah untuk membantu petambak garam dalam hal permodalan, pengendalian harga garam dan pengembangan usaha garam rakyat.
3. Mengintensifkan penyuluhan pengetahuan dan alih teknologi dibidang pertanian garam supaya para petambak garam dapat mengembangkan usaha ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta:STIE YKPN
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arief, muhammad. 2005. Dampak penerapan “Metode Pilot Project Ladang Garam Terhadap Pendapatan Petani Garam Rakyat ( Studi Kasus Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang)”: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya..
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Kabupaten Pati Dalam Angka*, Pati.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Jawa tengah Dalam Angka*, Jawa Tengah.
- Bahtiar Affandy (2010)”*Implementasi Dana Bantuan Agribisnis Pengembangan Usaha Peternakan Itik Di Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Brebes Tahun 2006-2007* Jurusan Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Daniel, Moehar. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: ANDI
- Devita, Ayu miranda. (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “*Studi implementasi kebijakan pengadaan garam beryodium di kecamatan Batangan kabupaten Pati*” Tesis. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro
- Moleong, Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES: Jakarta
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor :134/M-IND/PER/10/2009 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Garam.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER/06/Men/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan tahun 2012
- Rakim. 2011. Pengertian Variabel dan Hipotesis Penelitian. <http://rakim-ykp.blogspot.com/2008/06/pengertian-variabel.html> (diakses desember 10. 2012.12.00 wib)

Subarsono ,AG.2005.Analisis kebijakan Publik,Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugiyono.2005. *Metode Penelitian Kualitatif*.Penerbit Alfabeta: Bandung.

Sutiknjo, Tutut Dwi. 2005. *Ekonomi Pertanian*. Kediri : Universitas Kediri

Unnes. 2009. *Pedoman Penulisan Skripsi FE*. Semarang : UNNES Press

Wibowo M.E.et al. 2009. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Wahab, Solichin Abdul, 2001, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta



## Lampiran

### .Reduksi data

No	Pertanyaan		Jawaban
1.	<p>Tentang mekanisme penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR</p>	<p>Bagaimana Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR di Desa Asempapan? Sumber: Bpk ari (kasie pengembangan wilayah pesisir Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten Pati) dan bapak Sohih ( Tim Pendamping )</p> <p>Apa saja syarat untuk mendapatkan dana bantuan tersebut didesa anda? Sebutkan!</p> <p>Berapa besar Dana Bantuan yang di salurkan</p> <p>Bagaimana mekanisme pengambilan Dana Bantuan tersebut</p>	<p>Sosialisasi-pendataan-pembentukan kelompok-pembuatan proposal-pembuatan rekening-pencairan dana</p> <p>Menyerahkan data diri dan membuat proposal sesuai arahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>Pada tahun 2011 sebesar 225 juta dan pada tahun 2012 sebesar 325 juta</p> <p>Dana di transfer ke rekening ketua kelompok setelah syarat yang di berikan dapat dilaksanakan</p>
2	<p>Tentang manfaat dari program penyaluran Dana Bantuan PNPM KP PUGAR</p>	<p>Bagaimana pemanfaatan Dana Bantuan Pugar di Desa Asempapan Sumber: Bapak Sohih, Bapak Mulyono dan</p>	<p>Dana bantuan PNPM KP PUGAR membantu permodalan dan meningkatkan produktifitas petambak garam di Desa Asempapan diterima.</p>

		Bapak solkhan	Para petambak garam menggunakan dana bantuan yang berupa uang tunai untuk membeli pompa air. Dengan adanya pompa air dapat membantu para petambak garam untuk melanjutkan usaha produksi garam mereka yang sebelumnya berhenti sementara karena ketiadaan air
3.	Tentang kendala yang terjadi pada program penyaluran Dana Bantuan Pugar di Asempapan	Adakah kendala pada proses penyaluran Dana Bantuan Pugar di Desa Asempapan Sumber: Bapak Ari, Bapak Helmi, Bapak Sohih Dan Bapak Sunarso	Kendala teknis dalam program Penyaluran Dana Bantuan dan kendala dalam Pengembangan Usaha Garam Rakyat



## Hasil wawancara

No	Tanggal	Sumber	Pertanyaan	Jawaban
1	3 & 5 februari 2013	Bapak Ari Kasie pengembangan wilayah pesisir dan Bapak Sohik ketua tim pendamping Desa Asempapan	Bagaimana mekanisme penyaluran dana bantuan Pugar di Desa Asempapan?	Setelah adanya sosialisasi petambak garam membentuk kelompok lalu setiap kelompok membuat proposal dan menyerahkannya ke Dinas Kelautan dan Perikanan kemudian dana akan di cairkan dan di transfer ke rekening yang telah dibuat pada bank yang telah ditunjuk
2	5 februari 2013	Bapak Mulyono petambak garam Desa Asempapan. Bapak Ari kasie pengembangan wilayah pesisir	Apa saja syarat untuk mendapatkan dana bantuan tersebut?	Menyerahkan data diri dan selanjutnya menyerahkan Proposal yang telah mereka buat sesuai arahan dari tim teknis Dinas Kelautan dan Perikanan
3.	5 februari 2013	Bapak Ari dan Pak Helmi ( tim Teknis Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Pati )	Bagaimana menentukan layaknya target untuk mendapatkan bantuan?	Dilakukan tinjauan ke Desa yang akan mendapatkan bantuan dan meminta tim pendamping untuk melakukan survei dan pendataan
4.	5 februari 2013	Bapak Ari	Berapa total dana yang disalurkan?	Jumlah dana bantuan PUGAR di kabupaten Pati tahun 2011 sebesar Rp 5.435.000.000 dan disalurkan di 18 desa dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya yaitu Rp 9.300.000.000 dan di salurkan ke 20 desa penghasil garam
5.	3 februari 2013	Bapak sohik dan Bapak Sunarso ( kepala Desa Asempapan )	Berapa besar dana yang disalurkan kepada petambak garam di Desa Asempapan	di desa Asempapan dana yang disalurkan pada tahun 2011 sebesar 225 juta dan di tahun 2012 sebesar 325 juta yang disalurkan pada 300 petambak garam di desa Asempapan. Setiap petani garam

				mendapatkan Rp 1.400.000 dengan rincian Rp 1.000.000 untuk membeli pompa air dan Rp 400.000 sebagai iuran untuk pengerukan sungai, pelebaran dan pengaspalan jalan
6.	3 & 5 februari 2013	Bapak Ari dan Bapak Sohih	Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini di Desa Asempapan?	Ada dua kendala yaitu kendala teknis dalam program penyaluran dana bantuan dan kendala dalam pengembangan usaha garam rakyat.
7.	5 februari 2013	Bapak Ari dan Pak Helmi	Solusi apa yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut?	Untuk mengatasinya masing-masing pihak dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan peraturan yang ada. Komunikasi yang baik antara petambak garam dan pemerintah harus lebih ditingkatkan dengan menjalin pola kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Jika dilihat dari pengembangannya, usaha garam rakyat masih bersifat tradisional dan berskala kecil. Padahal apabila usaha ini dikembangkan dengan baik, usaha ini dapat dijadikan sebagai mata pencaharian yang menjanjikan. Oleh karena itu diharapkan peran serta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan agar intensif memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada petambak garam tentang pengembangan usaha garam rakyat secara modern dan lebih baik

8.	3, 5 & 6 februari 2013	Bapak Mulyono, Bapak solkhan dan Bapak Sohih	Bagaimana pemanfaatandari dana bantuan ini?	Dana yang di dapat di gunakan untuk membeli Pompa air dan untuk Iuran Perbaikan Sarana penunjang usaha seperti perbaikan jalan, pengerukan sungai dan lain-lain.
----	------------------------------	---	---	---



Pedoman Wawancara ( bagi Petani Garam)

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN  
PNPM KP PUGAR ( PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT  
) DI DESA ASEMPAPAN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN  
PATI TAHUN 2011-2012**

Nomor urut responden ;

Desa :

**A. Identitas responden**

1. Nama :
2. Umur :
3. Alamat:
4. Sumber utama pendapatan:
5. Lama menjadi petani garam:

**B. Daftar pertanyaan**

1. Bagaimana anda mendapatkan dana bantuan PNPM KP PUGAR di desa anda?
2. Apa saja syarat untuk mendapatkan dana bantuan tersebut didesa anda? Sebutkan!
3. Berapa besar dana bantuan yang diterima? Apa wujudnya?
4. Bagaimana pemanfaatan dari dana bantuan PNPM KP PUGAR?
5. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses produksi garam?

**Pedomam Wawancara ( bagi Pengelola )**  
**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN DANA BANTUAN**  
**PNPM KP PUGAR ( PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT**  
**) DI DESA ASEMPAPAN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN**  
**PATI TAHUN 2011-2012**

Nomor urut responden ;

**A. Identitas responden**

1. Nama :
2. Umur :
3. Alamat :
4. Pekerjaan :
5. Jabatan :

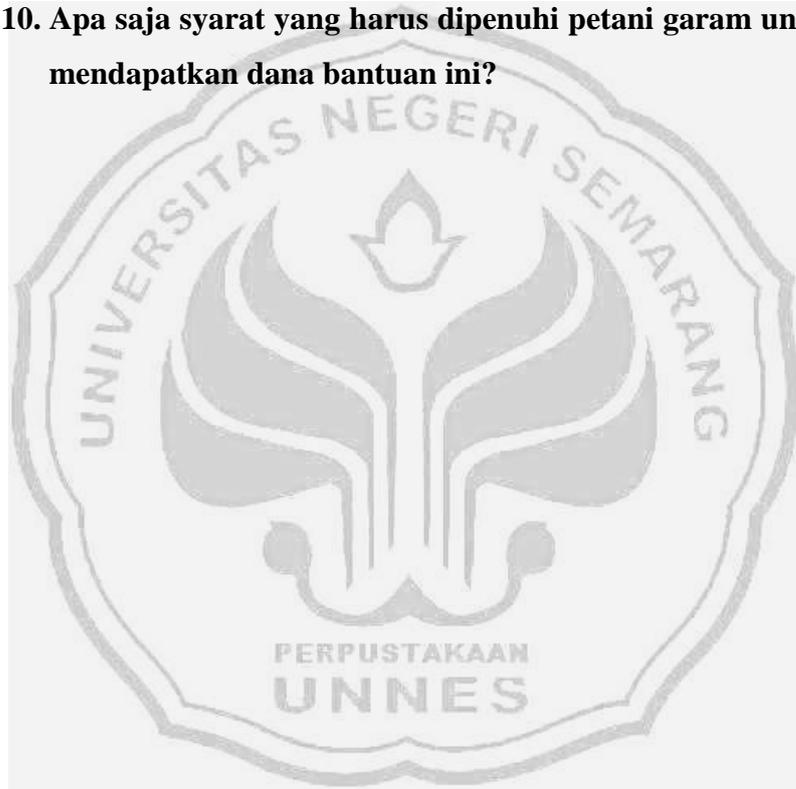
**B. Daftar pertanyaan**

1. Bagaimana mekanisme atau tahapan penyaluran dana bantuan PNPM KP PUGAR didesa Asempapan?
2. Apakah pengelola melakukan pendampingan terhadap target penerima dana bantuan dalam pelaksanaan usahanya?
3. Adakah pemantuan dari para pengelola terhadap pelaksanaan usaha target penerima dana bantuan PNPM KP PUGAR?
4. Berapa total besarnya dana bantuan program PNPM KP PUGAR ini digulirkan?
5. Berapa besarnya dana bantuan yang disalurkan untuk petani garam?
6. Bagaimana mekanisme pengambilan dana bantuan PNPM KP PUGAR yang disalurkan untuk petani garam?
7. Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program penyaluran dana PNPM KP PUGAR di desa Asempapan?

- a) Ya
- b) Tidak

(jika Ya apa kendala tersebut?.....)

8. Solusi apa yang di ambil untuk mengatasi kendala yang ada?
9. Bagaimana cara menentukan layak tidaknya target untuk mendapatkan dana bantuan yang disalurkan kepada petani garam?
10. Apa saja syarat yang harus dipenuhi petani garam untuk mendapatkan dana bantuan ini?



**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN DANA  
BANTUAN PNPM KP PUGAR ( PEMBERDAYAAN  
USAHA GARAM RAKYAT ) DI DESA ASEMPAPAN  
KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI  
TAHUN 2011-2012**

---

**A. Identitas Responden**

1. Nomor Responden : \_\_\_\_\_
2. Nama Responden : \_\_\_\_\_
3. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Alamat Responden : \_\_\_\_\_
5. Usia : ..... tahun
6. Pendidikan Terakhir : SD ( ) SMP( ) SMA( )  
Diploma( ) S1( )
7. Lama Berusaha : ..... tahun

**B. Jenis, Status dan Luas lahan lahan yang dipakai untuk satu kali masa tanam garam :**

1. Jenis lahan tambak : a. tambak layah  
=..... Ha
- b. tambak biasa  
=..... Ha
- c. tambak darat (sawah)  
=..... Ha
2. Status dan luas lahan
  - a. Milik sendiri =..... Ha  
Rp..... /th

b. Sewa =..... Ha  
Rp..... /th

c. Pinjaman keluarga =..... Ha  
Rp..... /th

3. Bahan dan alat produksi pembuatan garam apa saja yang diperlukan?sebutkan!

4. apakah saudara menggarap lahan tambak garam yang saudara miliki secara sendiri?

5. Ataukah saudara memakai tenaga kerja upahan untuk membantu anda dalam menggarap lahan tambak garam?

#### **Kebutuhan Tenaga Kerja Produksi**

	Jumlah orang	Upah setiap TK /hari	Jam kerja/hari
1. Pengolahan tanah	.....or	Rp.....	.....j
2. produksi	ang	.....	am
3. pengangkutan.....	.....or	Rp.....	.....j
.....	ang	.....	am
.....	.....or	Rp.....	.....j
.....	ang	.....	am
.....	.....or	Rp.....	.....j
.....	ang	.....	am
.....	.....or	Rp.....	.....j
.....	ang	.....	am

#### **Produksi Garam Untuk Satu Kali Masa Panen**

1. Berapa jumlah produksi garam yang diperoleh pada saat panen?.....Kg

2. Berapa harga garam pada saat panen?  
Rp...../kg

3. Apakah saudara mendapatkan keuntungan tambahan dari usaha selain produksi garam? Sebutkan!

4. Berapa hari sekali masa panen tambak garam saudara?.....

### C. Kondisi Petani Garam

1. Sampai saat ini Sdr/Bapak/ibu sudah menjadi petani garam selama.....tahun
2. Apakah selama menjadi petani pernah mengikuti kursus/pelatihan atau penyuluhan-penyuluhan
  - a. Ya, misalnya.....
  - b. Tidak

3. Kesulitan apa saja yang saudara temui selama menjadi petani garam?

.....

.....

.....

4. Apa yang menjadi faktor penyebab gagal produksi?

.....

.....

.....

5. Menurut saudara, bagaimana prospek usaha produksi garam ini ?

.....

.....

.....

### D. Total Pendapatan, Total biaya Lain-lain, dan Faktor Produksi Lain yang Belum Tercantum di Atas

	Jumlah
1. Total Pendapatan	Rp.
2. Total biaya lain-lain	.....
a. Pajak	Rp.
b. Iuran irigasi	.....





**Kincir angin sebagai sarana penunjang dalam produksi garam**



**Proses pembuatan garam di desa Asepapan**



**Wawancara dengan Bapak Sunarso, Kepala Desa Asempapan**



**Wawancara dengan Bapak Sohih, Tim Pendamping Petambak Garam di Desa Asempapan**



**Wawancara dengan Petambak Garam**



**Wawancara dengan Bapak Ari, Kasie Pengembangan Wilayah Pesisir,  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati**